



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH INVESTASI (PMDN DAN PMA)  
SERTA TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI PROVINSI-PROVINSI DI PULAU JAWA  
(STUDI PANEL DATA TAHUN 1990-2007)**

**TESIS**

**HERRY JOKO RENCONO  
0606152415**

**FAKULTAS EKONOMI  
MAGISTER PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JANUARI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH INVESTASI (PMDN DAN PMA)  
SERTA TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI PROVINSI-PROVINSI DI PULAU JAWA  
(STUDI PANEL DATA TAHUN 1990-2007)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi**

**HERRY JOKO RENCONO  
0606152415**

**FAKULTAS EKONOMI  
MAGISTER PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK  
JAKARTA  
JANUARI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Herry Joko Rencono

NPM : 0606152415

Tanda Tangan :

Tanggal : Januari 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Herry Joko Rencono  
NPM : 0606152415  
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Pengaruh Investasi (PMDN Dan PMA) Serta  
Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  
Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa (Studi Panel Data  
Tahun 1990-2007)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Mahyus Ekananda (.....)  
Penguji : Hera Susanti, SE., MSc (.....)  
Penguji : Iman Rozani, SE., M.Soc., Sc. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Ekonomi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sulit rasanya menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Mahyus Ekananda selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing tesis.
2. Pimpinan beserta staf Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) atas kesempatan menimba ilmu.
3. Para dosen pengajar di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) atas ilmu yang telah diberikan.
4. Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta serta saudara-saudara, terima kasih atas doa dan dukungannya.
5. Buat rekan-rekan seangkatan maupun beda angkatan, terima kasih untuk persahabatan dan persaudaraannya.
6. Untuk semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima salam hormat dari saya.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bisa bermanfaat.

Jakarta, Januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herry Joko Rencono  
NPM : 0606152415  
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik  
Departemen : Manajemen Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGARUH INVESTASI (PMDN DAN PMA)  
SERTA TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI PROVINSI-PROVINSI DI PULAU JAWA  
(STUDI PANEL DATA TAHUN 1990-2007)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : Januari 2010  
Yang menyatakan

**(Herry Joko Rencono)**

## ABSTRAK

Nama : Herry Joko Rencono  
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik  
Judul : Pengaruh Investasi (PMDN dan PMA) serta Tenaga Kerja Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa (Studi Panel  
Data Tahun 1990-2007)

Tesis ini membahas bagaimana pengaruh investasi (PMDN dan PMA) serta tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan panel data tahun 1990-2007. Penelitian ini dimulai dengan analisis deskriptif, analisis regresi (*cross section OLS*), panel data (*common* dan *fixed effect*) serta uji chow untuk menentukan model terbaik dan didapatkan *fixed effect* sebagai model terbaik. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PMDN, tenaga kerja dan periode waktu (dummy krisis) berpengaruh terhadap PDRB sedangkan PMA tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Kata kunci :

Pertumbuhan ekonomi, PDRB, investasi, PMA, tenaga kerja, periode waktu (dummy krisis), analisis deskriptif, analisis regresi (*cross section OLS*), panel data (*common* dan *fixed effect*), uji chow.

## ABSTRACT

Name : Herry Joko Rencono  
Study Program : Master of Planning and Public Policy  
Title : The Impact of Investment (PMDN and PMA) and Labor to the Economic Growth Provinces on the Island of Java (Panel Data Study Year 1990-2007)

This thesis discusses how the impact of investment (PMDN and PMA) and labor to economic growth in the provinces in Java Island (Jakarta, West Java, Central Java, East Java and Yogyakarta). This study uses panel data year 1990-2007. This research began with descriptive analysis, regression analysis (OLS Cross Section), panel data (fixed and common effect) and the chow test to determine the best model and established as a fixed effect model best. Research shows that this variable PMDN, labor and time period (crisis dummy) effect on GDP regional while PMA did not effect the GDP regional.

Key words :

Economic growth, GDP regional, investment, PMDN, PMA, labor, time period (crisis dummy), descriptive analysis, regression analysis (OLS cross section), panel data (fixed and common effect), chow test.

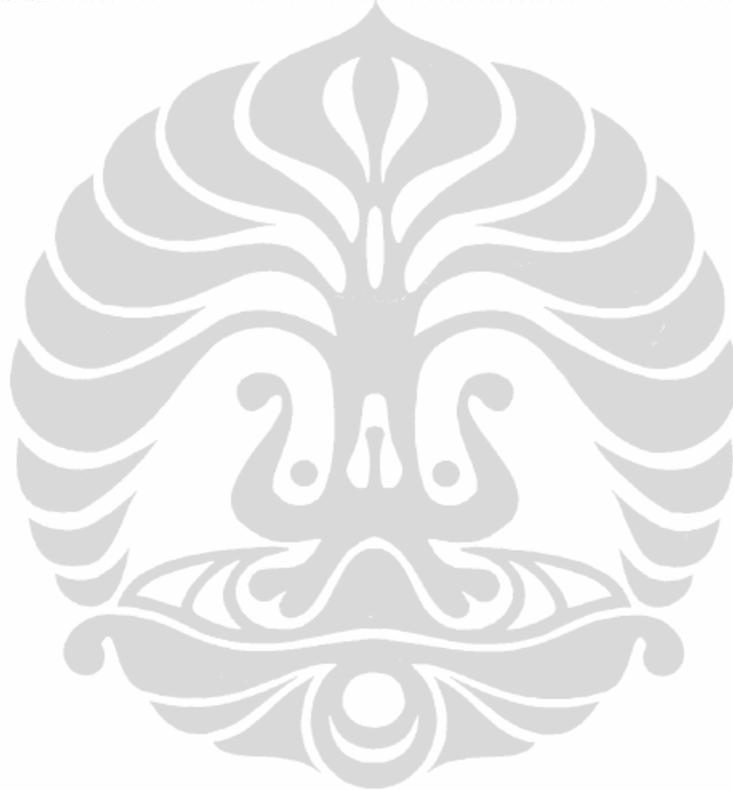
## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Penelitian .....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	10
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Peran Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	11
2.1.1. Peran Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	11
2.1.2. Peran Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	19
2.2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar.....	20
2.2.1.2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik.....	21
2.2.2. PDRB .....	23
2.2.3. Fungsi Produksi Cobb-Douglas .....	24
2.3. Penelitian Sebelumnya .....	25

3. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi DKI Jakarta .....	28
3.2. Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi Jawa Barat.....	30
3.3. Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	31
3.4. Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi Jawa Timur.....	33
3.5. Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi DI Yogyakarta.....	34
3.6. Kebijakan Pemerintah Terhadap Investasi.....	36
3.7. Kebijakan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja.....	39
4. METODOLOGI PENELITIAN	
4.1. Metode Penelitian .....	41
4.2. Teknik Pengumpulan Data .....	41
4.2.1. Studi Kepustakaan .....	41
4.2.2. Telaah Dokumen .....	41
4.2.3. Definisi Operasional Variabel .....	42
4.3. Spesifikasi Model .....	43
4.4. Prosedur Pengolahan Data .....	44
4.4.1. Analisis Deskriptif .....	44
4.4.2. Analisis Regresi ( <i>Cross Section OLS</i> ) .....	44
4.4.3. Panel Data ( <i>Common dan Fixed Effect</i> ) .....	46
4.4.4. Uji Chow .....	47
5. HASIL PENELITIAN	
5.1. Analisis Deskriptif .....	48
5.2. Analisis Regresi ( <i>Cross Section OLS</i> ) .....	60
5.3. Panel Data ( <i>Common dan Fixed Effect</i> ) .....	62
5.4. Uji Chow .....	71
5.5. Model Terbaik ( <i>Fixed Effect</i> ) .....	71
5.6. Pengaruh PMDN terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa .....	72
5.7. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.....	73

5.8. Pengaruh Periode Waktu (Dummy Krisis) terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa .....	74
5.9. Pengaruh PMA terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa .....	75
6. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan .....	76
6.2. Saran .....	77

Daftar Referensi



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB, PMDN, PMA dan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa (Tahun 1990-2007) .....	6
Tabel 5.1. Descriptive Statistics Keseluruhan Provinsi .....	48
Tabel 5.2. Descriptive Statistics <sup>a</sup> Provinsi DKI Jakarta .....	50
Tabel 5.3. Descriptive Statistics <sup>a</sup> Provinsi Jawa Barat .....	51
Tabel 5.4. Descriptive Statistics <sup>a</sup> Provinsi Jawa Tengah .....	53
Tabel 5.5. Descriptive Statistics <sup>a</sup> Provinsi Jawa Timur .....	54
Tabel 5.6. Descriptive Statistics <sup>a</sup> Provinsi DI Yogyakarta .....	55
Tabel 5.7. Model Summary Hubungan Variabel .....	60
Tabel 5.8. Pengujian ANOVA <sup>b</sup> .....	60
Tabel 5.9. Coefficients <sup>a</sup> Hasil Pengujian Individual .....	61
Tabel 5.10. Pengujian Chow .....	71
Tabel 5.11. PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa sejak Krisis Ekonomi Tahun 1997 Tahun Dasar 2000 (Juta Rupiah/ Million Rupiahs) .....	74

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Perbandingan PDRB di Pulau Jawa dan Luar Jawa Tahun 2007.....	5
Gambar 1.2. Perbandingan PMDN di Pulau Jawa dan Luar Jawa Tahun 2007.....	5
Gambar 1.3. Perbandingan PMA di Pulau Jawa dan Luar Jawa Tahun 2007.....	5
Gambar 1.4. Perbandingan Tenaga Kerja di Pulau Jawa dan Luar Jawa Tahun 2007.....	5
Gambar 2.1. Pengaruh Investasi Terhadap Kapasitas Produksi.....	12
Gambar 2.2. Tenaga Kerja dalam Fungsi Produksi.....	16
Gambar 3.1. Penyebaran PMDN di Sektor-Sektor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007.....	29
Gambar 3.2. Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007.....	29
Gambar 3.3. Penyebaran PMDN di Sektor-Sektor Provinsi Jawa Barat Tahun 2007.....	30
Gambar 3.4. Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2007.....	31
Gambar 3.5. Penyebaran PMDN di Sektor-Sektor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.....	32
Gambar 3.6. Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.....	32
Gambar 3.7. Penyebaran PMDN di Sektor-Sektor Provinsi Jawa Timur Tahun 2007.....	33
Gambar 3.8. Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2007.....	34
Gambar 3.9. Penyebaran PMDN di Sektor-Sektor Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2007.....	35
Gambar3.10. Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2007.....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data PDRB, PMDN, PMA, Tenaga Kerja dan Periode Waktu (Dummy Krisis) Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.
- Lampiran 2 Analisis Deskriptif
- Lampiran 3 Analisis Regresi (*Cross Section OLS*)
- Lampiran 4 Panel Data (*Common dan Fixed Effect*)
- Lampiran 5 Uji Chow



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, pemerintah secara umum dalam pembangunan ekonomi nasional maupun regional memiliki usaha dan kebijaksanaan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dapat dikatakan arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin yang mana hal tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) dari sisi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto per kapita maupun pendapatan per kapita.

Dalam upaya mencapai kemakmuran suatu negara atau suatu daerah, sekaligus menanggulangi masalah kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, salah satu instrumen atau tolok ukur yang dipakai adalah pertumbuhan ekonomi. Banyak penelitian dan literatur mengemukakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara dipakai sebagai ukuran maju mundurnya perekonomian di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah agar terus berkesinambungan membutuhkan peningkatan investasi dan ketersediaan faktor-faktor produksi. Sumber investasi dimaksud dapat diperoleh dari dalam berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan dari luar negeri yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada asas desentralisasi dengan prinsip otonomi yang mengedepankan kebebasan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing memberikan peluang pada daerah untuk membangun daerahnya dengan keinginan dan kemampuan daerahnya masing-masing sehingga bisa menyumbang bagi perekonomian nasional karena memang kondisi perekonomian nasional tentu tidak terlepas dari perkembangan seluruh perekonomian di tingkat daerah, baik provinsi ataupun kota maupun kabupaten. Pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada didaerahnya masing-masing

dengan melaksanakan pembangunan daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adanya pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki dan dikembangkan oleh suatu negara atau daerah melalui proses produksi sehingga menghasilkan nilai tambah adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah. Yang menjadi perhatian bahwa dalam proses produksi terhadap sumber daya potensial yang dimiliki suatu negara atau daerah memerlukan permodalan (investasi) yang secara intern akan menghasilkan pajak dan retribusi sebagai sumber pokok dari pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah tersebut dapat dilihat dari indikasi terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan pengeluaran pemerintah, tumbuhnya investasi dan meningkatnya pendapatan ekspor netto.

Perekonomian suatu negara atau daerah diharapkan terus berkembang dan perkembangannya paling tidak ditentukan oleh 2 (dua) faktor produksi, yaitu kapital (*capital*) dan tenaga kerja (*labor*). Faktor produksi kapital menyediakan barang-barang modal (*capital goods*) seperti mesin-mesin dan peralatannya sedangkan tenaga kerja menyediakan kemampuan (*skill*) yang secara bersama-sama mampu merubah input menjadi output. Sistem perekonomian digerakkan oleh kedua faktor produksi tersebut yang merupakan faktor utama yang menjadi penggerak sehingga arus perputaran kegiatan ekonomi dapat tetap terus berlangsung. Kontribusi kedua faktor produksi tersebut pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah.

Mankiw (2003) menjelaskan bahwa menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan tenaga kerja merupakan upaya yang paling mendasar untuk mencapai stabilitas perekonomian, mengingat dua faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja karena sama-sama menentukan jumlah output barang dan jasa maka faktor-faktor produksi juga menentukan pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional ditentukan oleh harga-harga faktor produksi yang dibayarkan seperti upah (*wage*) yang diterima oleh para pekerja dan sewa (*rent*) yang dikumpulkan oleh para pemilik modal.

Paul Douglas (Mankiw, 2003) seorang profesor ekonomi dan senator Amerika Serikat pada tahun 1927 menemukan fakta bahwa pembagian pendapatan

nasional di antara pemilik modal dan tenaga kerja tetap konstan selama periode yang panjang. Dengan kata lain, ketika perekonomian mengalami pertumbuhan yang mengesankan, pendapatan total pekerja dan pendapatan total pemilik modal tumbuh pada tingkat yang nyaris sama.

Investasi dapat dikatakan merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian suatu negara atau daerah karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Dengan adanya kegiatan investasi faktor produksi kapital dapat terbentuk dimana sebagian dari investasi yang ada tersebut digunakan untuk pengadaan berbagai barang modal yang akan digunakan dalam kegiatan proses produksi yang berperan untuk mentransformasikan berbagai input menjadi output atau produk. Melalui investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan yang pada gilirannya dapat meningkatkan output yang akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Untuk menarik minat investasi di suatu negara atau daerah tidaklah mudah karena dalam banyak kasus yang terjadi keinginan pemerintah untuk menarik minat investor sering berbenturan dengan kepentingan (aspirasi) tenaga kerja seperti tuntutan buruh atas kenaikan upah yang tidak mampu dipenuhi oleh pengusaha dan keengganan pengusaha untuk mempekerjakan warga di sekitar lingkungan pabrik yang tidak memenuhi kualifikasi sehingga akhirnya berdampak adanya penolakan warga terhadap keberadaan pabrik diwilayahnya. Permasalahan-permasalahan semacam diatas seringkali muncul berulang-ulang dan hal ini menunjukkan masih ada yang perlu diperbaiki dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang berkewajiban mencari solusi sehingga investasi yang diharapkan oleh negara maupun daerah tersebut tidak terhambat.

Investasi sangat dibutuhkan tentunya bukan tanpa alasan, salah satu alasan pokok tentang manfaat investasi khususnya PMA terhadap negara-negara penerima (*recipient countries*) adalah harapan untuk mendorong pengembangan industri pendukung dan pemasok di negara-negara tersebut sehingga dapat tercipta lapangan pekerjaan yang baru, adanya alih teknologi dan limpahan (*spillovers*) serta peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja yang ada. Adanya aliran modal yang dipakai dalam proses produksi, belanja teknologi dan faktor-faktor produksi lainnya secara

langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi secara agregat sehingga dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat dari adanya produktivitas ekonomi yang dibarengi dengan penciptaan nilai tambah adanya investasi di suatu negara atau daerah tersebut.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) masih dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara atau daerah. Dengan jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif selain itu dengan adanya pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Indonesia memiliki peluang menjadi sasaran investasi dari para investor mengingat begitu besarnya potensi tenaga kerja di Indonesia apalagi dalam era globalisasi sekarang ini terutama dalam bidang ekonomi, Indonesia memiliki ukuran pasar yang menjanjikan.

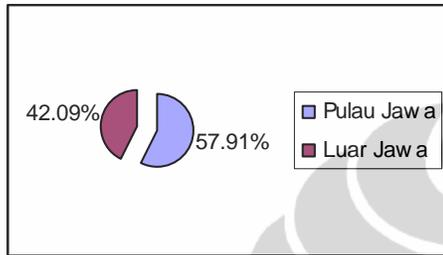
Struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di pulau jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,9 persen, dimana sumbangan masing-masing provinsi terhadap Pulau Jawa berturut-turut adalah : Provinsi DKI Jakarta (28,7 persen), Jawa Timur (25,6 persen), Jawa Barat (25,1 persen), Jawa Tengah (14,0 persen), Banten (3,1 persen) dan D.I Yogyakarta (1,6 persen). Berdasarkan perbandingan antar provinsi, tiga provinsi yang terbesar kontribusinya adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat dimana ketiganya memberikan kontribusi sebesar 46,0 persen terhadap Indonesia (Khoiril Anwar, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2008).

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia pada tahun 2005 sekitar 48,25% ada di Pulau Jawa dan pada tahun 2006 mencapai 62,68% serta tahun 2007 mencapai 53,52%. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Jawa pada tahun 2005 mencapai 81,26%, pada tahun 2006 mencapai sekitar 73,83% dan pada tahun 2007 mencapai 82,16%. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi tempat bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya. Dari sisi tenaga kerja, pada kondisi Agustus 2007 sekitar 59,91 juta pekerja dari 99,93 juta pekerja nasional ada di Pulau Jawa (59,95%). Gambar 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. menunjukkan

perbandingan PDRB, PMDN, PMA dan Tenaga Kerja di Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa tahun 2007.

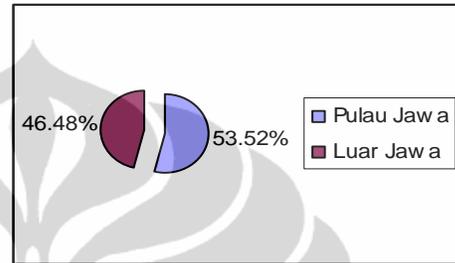
**Gambar 1.1.**

**Perbandingan PDRB di Pulau Jawa dengan Luar Jawa Tahun 2007**



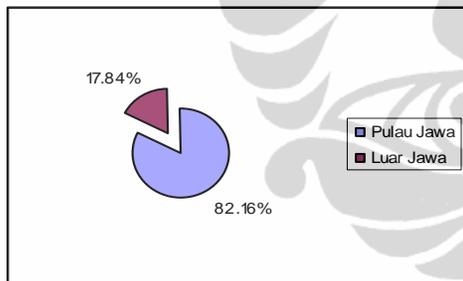
**Gambar 1.2.**

**Perbandingan PMDN di Pulau Jawa dengan Luar Jawa Tahun 2007**



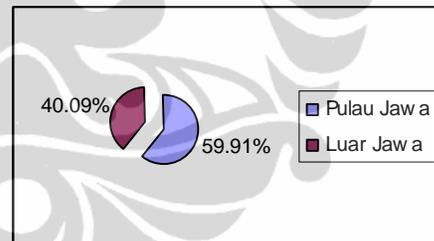
**Gambar 1.3.**

**Perbandingan PMA di Pulau Jawa dengan Luar Jawa Tahun 2007**



**Gambar 1.4.**

**Perbandingan Tenaga Kerja di Pulau Jawa dengan Luar Jawa Tahun 2007**



Sumber : BPS, BKPM Tahun 2007 dan Khoiril Anwar (Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008) tahun 2007.

Tabel laju pertumbuhan PDRB, PMDN, PMA dan Tenaga Kerja di provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 1990-2007.

**Tabel 1.1.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB, PMDN, PMA dan Tenaga Kerja**  
**Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa (Tahun 1990-2007)**

Tahun	Provinsi DKI Jakarta				Provinsi Jawa Barat				Provinsi Jawa Tengah				Provinsi Jawa Timur				Provinsi D.I. Yogyakarta			
	PDRB	PMDN	PMA	TK	PDRB	PMDN	PMA	TK	PDRB	PMDN	PMA	TK	PDRB	PMDN	PMA	TK	PDRB	PMDN	PMA	TK
1991	7.8	121.63	144.72	-4.18	6.89	1019.71	79.60	4.12	7.16	50.19	529.89	0.89	7.08	138.29	-32.35	0.87	5.19	405.50	401.38	2.50
1992	8.63	-45.65	-37.95	0.90	7.01	104.37	53.01	4.91	7.44	43.30	-86.66	0.50	7.04	-45.84	1267.77	-0.50	6.94	-71.71	27.65	1.08
1993	8.43	385.65	18.77	3.73	6.89	165.20	1151.82	-0.12	6.10	240.05	13.11	0.16	6.91	-13.55	-90.49	0.65	6.39	680.74	-21.91	-2.86
1994	8.61	21.36	242.93	6.39	7.20	83.39	-37.18	3.25	6.96	9.16	3165.97	0.97	7.23	442.44	446.04	4.59	8.11	288.86	-51.86	1.08
1995	9.27	-42.22	-34.45	2.77	8.07	-30.21	4.05	-1.15	7.34	-68.94	-66.43	-2.20	8.18	117.29	32.85	-4.51	7.98	168.53	-51.13	-7.40
1996	9.1	84.02	181.02	8.02	9.21	6.10	-10.48	7.15	7.30	67.49	64.31	5.95	8.26	-44.49	28.44	-1.00	7.79	-90.76	919.70	2.66
1997	5.11	4.51	-13.23	4.12	4.87	103.12	16.75	0.86	3.03	97.45	-24.39	-0.94	5.02	-55.75	-52.88	7.62	3.65	1555.25	-91.80	2.80
1998	-17.5	-60.42	-34.67	-1.94	-17.77	-73.62	189.23	2.07	-11.74	-30.46	74.61	0.42	-16.12	169.77	225.79	1.48	-11.18	-24.36	-69.59	-2.88
1999	-0.29	-56.61	71-12	6.51	-9.19	-18.95	-36.53	3.57	3.49	-47.10	729.77	3.06	1.21	-72.48	-14.83	0.88	2.63	-98.21	919.80	5.09
2000	4.33	-3.21	35.07	-9.47	4.15	50.20	10.36	5.36	3.93	311.18	-730.95	4.65	3.26	148.34	678.89	-0.46	4.01	1371.64	-37.94	10.06
2001	4.72	28.08	-16.01	-0.33	3.89	-91.30	-64.03	3.14	3.59	-74.96	-58.84	-1.51	3.76	-71.69	-95.81	-0.08	4.27	-62.15	-96.76	-2.87
2002	4.88	-25.28	-24.81	-4.33	3.13	1358.19	47.54	0.29	3.55	-16.25	-57.95	0.56	3.80	-89.23	-51.95	0.71	4.49	32.60	-33.67	0.86
2003	5.31	136.76	170.50	3.42	4.67	-71.25	-18.39	-1.98	4.98	-50.73	97.59	-0.20	4.78	237.16	126.22	-2.86	4.58	-66.98	1799.94	0.85
2004	5.65	-20.70	-52.48	3.50	4.77	6.51	8.76	3.61	5.13	-73.71	72.68	2.67	5.83	-25.02	-17.14	5.14	5.12	-42.37	-96.07	2.64
2005	6.01	-37.38	138.39	1.94	5.60	1.06	87.83	0.20	5.35	765.24	-77.45	0.13	5.84	750.32	257.61	1.69	4.73	79.97	1181.15	3.28
2006	5.95	11.11	-61.04	6.94	6.02	36.10	-47.85	1.61	5.33	-75.52	1215.55	0.12	5.80	-88.58	-53.16	0.01	3.70	-36.23	137.16	-0.41
2007	6.44	28.79	199.69	0.80	6.41	104.31	-21.17	3.51	5.59	-4.44	-74.74	4.73	6.11	214.10	310.62	6.12	4.31	54.16	-98.84	1.35

Sumber : Data diolah dari BPS Provinsi di Pulau Jawa  
Keterangan (Satuan) :  
PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000  
PMDN : Juta/ million (Rp)  
PMA : Ribu/ thousand (US \$)  
TK : Jiwa/ orang

Dari tabel 1.1. terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa terjadi fluktuasi tetapi tidak terlalu jauh angka perbedaan perubahannya dari tahun ke tahun di sekitar 4 sampai 9 persen kecuali yang terjadi pada tahun 1998 yang minus diatas angka 10 persen. Laju pertumbuhan PMDN dan PMA yang terjadi di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa terlihat sangat berfluktuasi angkanya sekitar minus dibawah 100 persen sampai dengan positif di atas angka 1000 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang terjadi (PMDN dan PMA) di provinsi-provinsi Pulau Jawa setiap tahunnya sangat bervariasi. Laju pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa juga berfluktuasi berkisar antara minus 10 sampai dengan positif 10 persen artinya setiap tahunnya laju pertumbuhan tenaga kerja berubah-ubah/ tidak stabil.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada kondisi dimana PDRB, PMDN, PMA dan tenaga kerja provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa yang lebih dari setengah PDRB, PMDN, PMA dan tenaga kerja nasional serta melihat laju pertumbuhan dari PDRB, PMDN, PMA dan tenaga kerja yang terjadi untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa dimana laju pertumbuhannya relatif stabil untuk PDRB dan tenaga kerja tetapi untuk PMDN dan PMA berfluktuatif maka dalam penelitian ini dilakukan terutama untuk provinsi di Pulau Jawa (Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta) dengan pertanyaan penelitian :  
Seberapa besar pengaruh investasi (PMDN atau PMA) atau tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

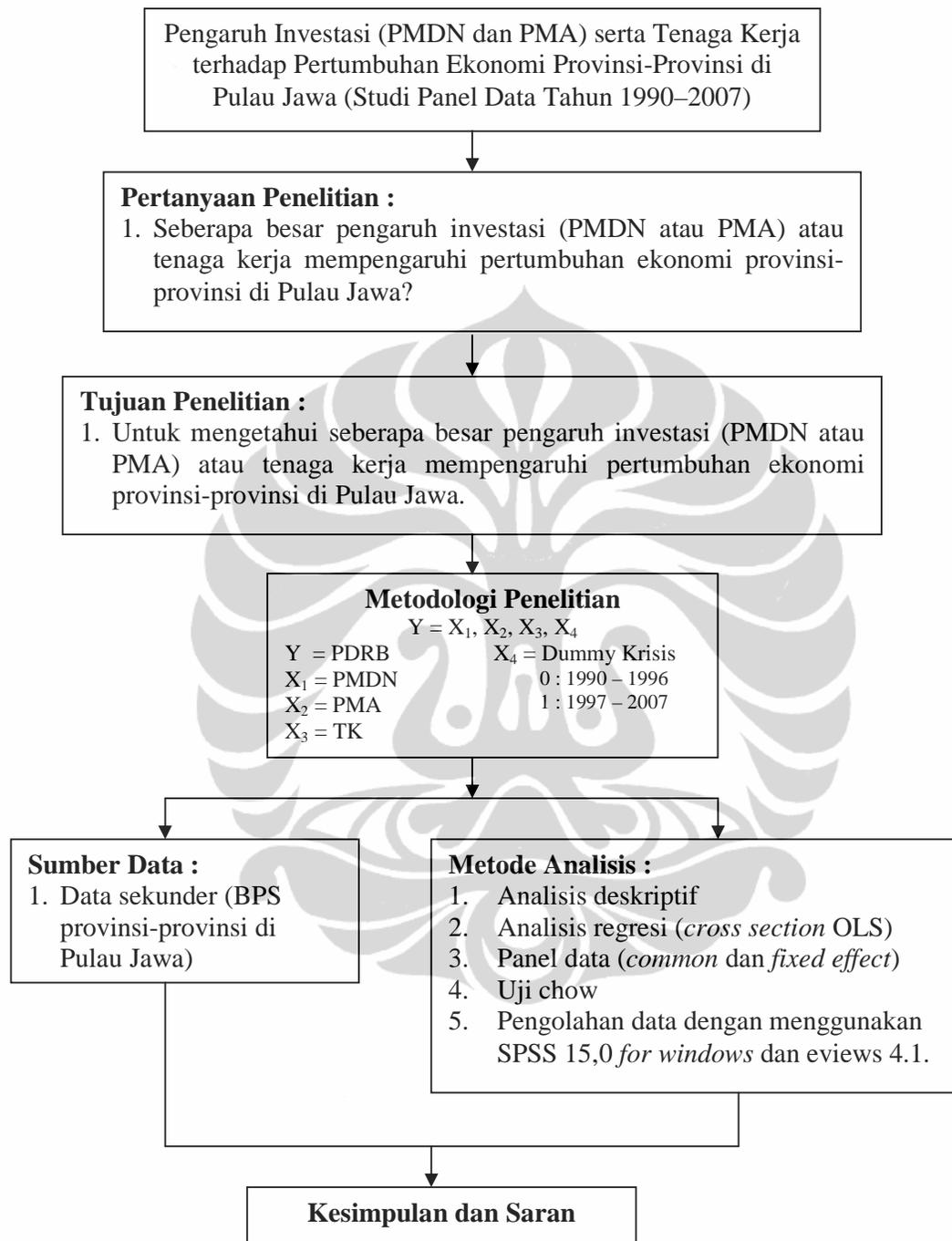
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi (PMDN atau PMA) atau tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Terhadap kepentingan dunia akademik, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pengaruh investasi (PMDN dan PMA) serta tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
2. Terhadap kepentingan dunia praktis, memberikan sumbangan melalui penelitian ini penulis ingin adanya kebijakan-kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa.



### 1.5. Kerangka Penelitian



## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

- Bab I      Pendahuluan, berisi : latar belakang; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka penelitian; sistematika penulisan.
- Bab II      Tinjauan Pustaka, berisi : peran investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi meliputi : peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, peran tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi; konsep pertumbuhan ekonomi meliputi : teori pertumbuhan ekonomi meliputi : teori pertumbuhan ekonomi harrod-domar, teori pertumbuhan neo klasik; PDRB; faktor produksi cobb-douglas; penelitian sebelumnya.
- Bab III      Gambaran Umum Penelitian, berisi : gambaran umum kondisi daerah Provinsi DKI Jakarta; gambaran umum kondisi daerah Provinsi Jawa Barat; gambaran umum kondisi daerah Provinsi Jawa Tengah; gambaran umum kondisi daerah Provinsi Jawa Timur; gambaran umum kondisi daerah Provinsi DI Yogyakarta; kebijakan pemerintah terhadap investasi; kebijakan pemerintah terhadap tenaga kerja.
- Bab IV      Metodologi Penelitian, berisi : metode penelitian; teknik pengumpulan data meliputi : studi kepustakaan, telaah dokumen, definisi operasional variabel; spesifikasi model; prosedur pengolahan data meliputi : analisis deskriptif, analisis regresi (*cross section OLS*), panel data (*common* dan *fixed effect*), uji chow.
- Bab V      Hasil Penelitian, berisi : analisis deskriptif; analisis regresi (*cross section OLS*); panel data (*common* dan *fixed effect*), uji chow, model terbaik (*fixed effect*); pengaruh PMDN terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa; pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa; pengaruh periode waktu (dummy krisis) terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa; pengaruh PMA terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
- Bab VI      Kesimpulan dan Saran, berisi : kesimpulan; saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Peran Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

##### 2.1.1. Peran Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kata kunci yang menjadi penentu laju pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah investasi karena keberhasilan pertumbuhan PDRB tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi dimana dengan terjadinya peningkatan investasi akan mendorong kenaikan output secara signifikan yang juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input yang pada gilirannya akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat pun akan mengalami peningkatan pula sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

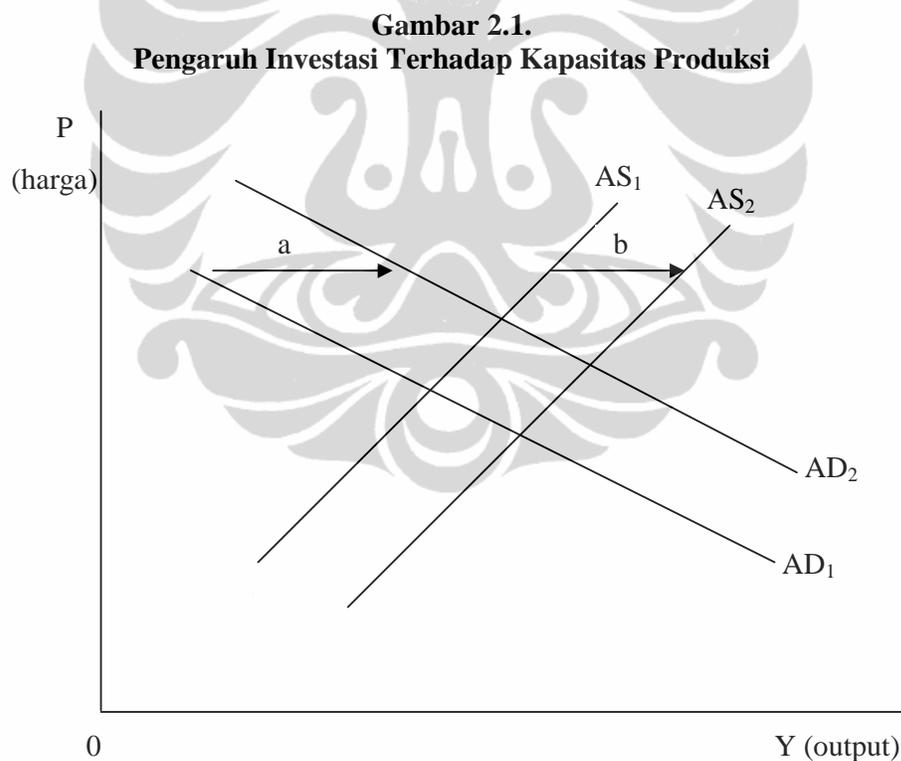
Harrod-Domar (dalam Jhingan, 2004) melihat begitu pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya investasi yang dipakai untuk meningkatkan stok barang modal sehingga dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan output. Sumber dana untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang ditabung. Harrod-Domar (dalam Jhingan, 2004) juga menjelaskan pula mengenai peranan kunci investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi bahwa dalam investasi memiliki watak ganda, yaitu :

1. Investasi menciptakan "pendapatan", dapat disebut sebagai "dampak permintaan" investasi.
2. Investasi memperbesar produksi perekonomian dengan cara meningkatkan "stok modal", dapat disebut sebagai "dampak penawaran" investasi.

Lebih lanjut Harrod-Domar (dalam Jhingan, 2004) menjelaskan bahwa selama investasi netto tetap terus berlangsung akan mengakibatkan pendapatan nyata dan output akan senantiasa terus membesar. Tetapi, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut, keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Jika tidak, setiap perbedaan antara keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas menganggur (*idle*). Hal ini

tentunya berakibat akan memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran investasi sehingga akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian, yaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan menggeser perekonomian keluar jalur ekuilibrium pertumbuhan mantap (*steady growth*).

Harrod-Domar (dalam Budiono, 1991) melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang ini,  $I$  (investasi) menambah stok kapital (misalnya, pabrik-pabrik, jalan-jalan dan sebagainya). Jadi  $I = \Delta K$ , dimana  $K$  adalah stok kapital dalam masyarakat. Ini berarti pula terjadi peningkatan kapasitas produksi masyarakat dan selanjutnya berarti bergesernya garis AS ke kanan. Di sisi lain dengan adanya penambahan stok kapital, masyarakat mendapatkan pendapatan (proses multiplier) sehingga terjadi kenaikan AD (garis AD naik keatas kanan), digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Budiono, Teori pertumbuhan ekonomi (1991).

Dimana :

- I = Investasi
- AS = Penawaran agregat
- AD = Permintaan agregat

- a =  $\Delta I$  menggeser AD lewat proses multiplier (jangka pendek)
- b =  $\Delta I$  menggeser AS lewat penambahan kapasitas produksi (jangka panjang)

Keynes (dalam Case and Fair, 1999) menyatakan bahwa salah satu indikator prospek masa depan adalah tingkat pertumbuhan sekarang. Jika keluaran (pendapatan) agregat ( $Y$ ) naik, investasi akan naik walaupun tingkat  $Y$  mungkin rendah. Pengeluaran investasi yang lebih tinggi itu mengakibatkan semakin naiknya keluaran, selanjutnya dapat mempercepat pertumbuhan keluaran agregat. Jika  $Y$  turun, harapan menurun dan pengeluaran investasi akan berkurang walaupun tingkat  $Y$  mungkin tinggi, sehingga mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi.

Salvatore dan Diulio (2004) mengungkapkan pula bahwa investasi bruto adalah komponen pengeluaran *aggregate* yang paling tidak stabil dan merupakan penyebab utama terjadinya siklus bisnis dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih lanjut dijelaskan bahwa investasi terdiri dari pembangunan rumah tinggal (*residensial*), pembangunan *nonresidensial* (kantor, hotel dan *real estate comersial* lainnya), peralatan atau mesin-mesin produksi yang tahan lama dan perubahan persediaan.

Salah satu faktor input yang diperlukan oleh perusahaan untuk menunjang proses produksinya adalah kapital yang berupa investasi dimana konsep dan definisi kapital/ modal itu sendiri dapat berbeda-beda tergantung pada kepentingan dan tujuan penggunaan kapital itu sendiri. Ward (1976) mendefinisikan kapital sebagai berikut :

- a. Kapital merupakan suatu faktor produksi yang terdiri dari barang-barang modal seperti konstruksi, mesin dan peralatan yang diciptakan dalam suatu sistem/ proses produksi dan berguna untuk proses produksi selanjutnya.
- b. Kapital/ modal dapat pula diartikan sebagai ukuran kekayaan nasional yang juga meliputi sumber daya manusia (*human capital*) maupun sumber daya alam (*natural resources*).
- c. Kapital/ modal adalah kekuasaan atas sumber dana dalam pengertian nilai uang seperti piutang, tagihan atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

Irawan dan Suparmoko (1992) mendefinisikan kapital sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan tehnik,

perbaikan-perbaikan dalam pendidikan, kesehatan dan keahlian. Selain itu juga termasuk sumber-sumber yang menaikkan tenaga produksi yang semuanya membutuhkan kepandaian penduduknya.

Noor (2005) menyatakan bahwa investasi mempunyai kaitan yang erat dengan ketenagakerjaan dimana kaitan investasi dengan ketenagakerjaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antara lain dari sisi penciptaan lapangan atau kesempatan kerja, besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan satu lapangan pekerjaan maupun potret dari produktivitas tenaga kerja, berapa besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja dan aspek-aspek lain yang terkait dengan masalah tenaga kerja.

Noor (2005) mengelompokkan investasi menurut beberapa kategori yaitu berdasarkan jenis, sponsor, pemilik, waktu dan umur investasi. Berdasarkan jenisnya investasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Investasi langsung (*direct investment*).

Investasi langsung adalah investasi pada asset/ faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis. Misalnya, investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Dalam pembicaraan sehari-hari investasi langsung disebut juga dengan investasi pada sektor riil atau investasi yang jelas wujudnya. Investasi jenis ini menghasilkan dampak berganda/ (*multiplier effect*) yang besar bagi masyarakat luas. Investasi langsung ini akan melahirkan dampak kebelakang (*backward*) berupa input usaha dan dampak kedepan (*forward*) dalam bentuk output usaha yang merupakan input bagi usaha lain.

2. Investasi tidak langsung (*indirect investment*).

Investasi tidak langsung (*indirect investment*) adalah investasi bukan pada asset/ faktor produksi, tetapi pada asset keuangan (*financial assets*) seperti deposito, investasi pada surat berharga (*sekuritas*) seperti saham dan obligasi, CP (*commercial paper*), reksadana dan sebagainya. Investasi pada asset keuangan (*financial assets*) bertujuan untuk mendapatkan manfaat masa depan. Manfaat masa depan dari investasi ini lebih dikenal dengan sebutan balas jasa investasi atau untuk menyederhanakannya sering disebut dengan istilah bunga.

Selanjutnya Noor (2005) menjelaskan investasi menurut karakteristik (sifat dan pelaku) dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Investasi publik (*public investment*).

Investasi publik (*public investment*) adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Investasi dengan karakteristik seperti ini bersifat nirlaba atau *non-profit motive* seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit dan sarana serta prasarana publik lainnya. Karena investasi ini dilaksanakan oleh negara maka dana atau pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping dilakukan oleh negara, investasi yang bertujuan untuk kepentingan publik atau *non-profit motive* ini ada juga yang dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti melalui berbagai yayasan di bidang pendidikan, agama, keterampilan, budaya, pelestarian lingkungan, kesenian, olah raga, dan sebagainya.

Investasi publik ini menghasilkan nilai tambah (*value added*) berupa barang dan jasa, lapangan pekerjaan, sewa dan bunga tanpa surplus usaha. Manfaat dari adanya investasi publik ini adalah mendorong mobilitas perekonomian dan meningkatkan peradaban masyarakat suatu negara. Dengan demikian resiko dari investasi publik ini adalah bila investasi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan publik alias sia-sia (investasi yang mubazir).

2. Investasi swasta (*private investment*).

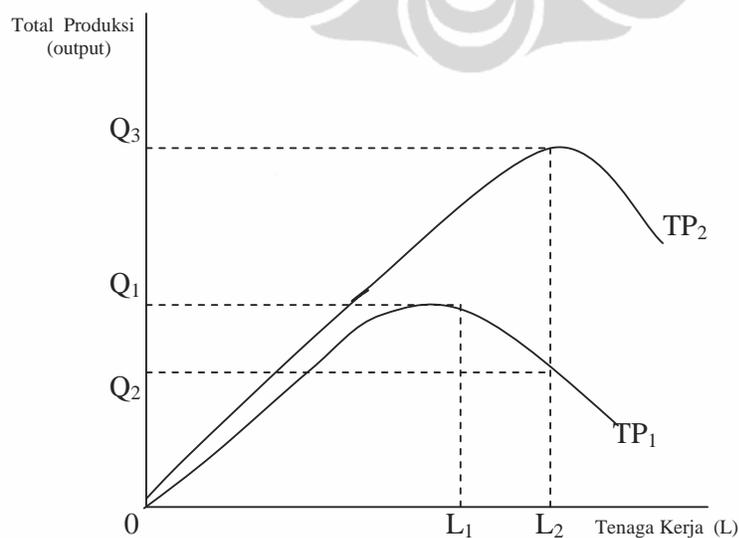
Investasi swasta (*private investment*) adalah investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan investasi dengan *profit motive*. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi atau perusahaan seperti usaha mikro atau rumah tangga, biasanya belum punya badan hukum serta usahanya relatif kecil yang bergerak di bidang industri dagang atau jasa. Bentuk lain dari karakteristik investasi swasta

adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dimana ada yang sudah berbadan hukum dan ada yang belum berbadan hukum dengan skala usahanya mulai dari yang kecil sampai menengah baik dilihat dari omset, modal usaha maupun tenaga kerja dengan bidang usaha industri, perdagangan ataupun jasa.

### 2.1.2. Peran Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rahardja dan Manurung (2004) mengenai tenaga kerja menjelaskan bahwa khususnya di negara sedang berkembang (NSB) sampai saat ini, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Sumber daya manusia yang melimpah dengan kualitas yang masih rendah merupakan sebuah modal sekaligus masalah yang harus ditangani secara komprehensif. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Seberapa banyak penambahan tenaga kerja akan terus meningkatkan output, akan sangat tergantung pada seberapa cepat terjadinya *The Law of Diminishing Return*. Penambahan tenaga kerja akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi jika proses *The Law of Diminishing Return* dapat ditunda dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dikaitkan dengan kemajuan teknologi produksi.

**Gambar 2.2.**  
**Tenaga Kerja Dalam Fungsi Produksi**



Gambar 2.2. menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja dengan tingkat output (fungsi produksi). Tercapainya kondisi optimal jika tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi adalah  $L_1$  dengan jumlah output (PDB/ PDRB) adalah  $Q_1$ . Jika jumlah tenaga kerja ditambah menjadi  $L_2$ , jumlah output (PDB/ PDRB) justru berkurang menjadi  $Q_2$ . Kondisi ini terjadi akibat cepat terjadinya *The Law of Diminishing Return*. Supaya penambahan tenaga kerja ke  $L_2$  dapat meningkatkan output (PDB/ PDRB) misalnya menjadi ke  $Q_3$ , maka yang harus dilakukan adalah menambah faktor-faktor produksi yang dianggap *ceteris paribus* misalnya investasi fisik (barang modal) dan SDM untuk menunda terjadinya *The Law of Diminishing Return*. Dengan tertundanya *The Law of Diminishing Return* akan berakibat fungsi produksi membaik sehingga penambahan tenaga kerja akan meningkatkan jumlah output (PDB/ PDRB), hal ini dapat digambarkan dengan bergesernya kurva produksi ke  $TP_2$ .

Badan Pusat Statistik (2003) mempunyai konsep dan definisi tentang tenaga kerja yang pada dasarnya menggunakan klasifikasi yang dipublikasikan oleh ILO (*International Labour Organization*), yaitu :

- a. Penduduk usia kerja adalah penduduk berdasarkan kelompok umurnya diharapkan sudah mampu bekerja. Usia 15 tahun keatas dipakai sebagai batas umur seseorang dianggap dapat bekerja.
- b. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Golongan penduduk ini disebut juga penduduk yang aktif secara ekonomi (*economically active population*).
- c. Bekerja adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam sehari dalam seminggu yang lalu. Bekerja satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus.
- d. Kesempatan kerja adalah menunjukkan banyaknya lapangan kerja yang terisi dan dicerminkan oleh jumlah penduduk yang bekerja.

Sedangkan berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*) bahwa penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Tenaga kerja.

Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun.

2. Bukan tenaga kerja.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa tenaga kerja dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Angkatan kerja

2. Bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Penduduk yang bekerja (sering disebut pekerja).

2. Penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS) mendefinisikan tenaga kerja sebagai berikut, yaitu :

1. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2. Setiap orang laki-laki atau wanita yang berumur 15 tahun keatas yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969). Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan.

4. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

## **2.2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Sukirno (1985) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang.

Sedangkan Boediono (1991) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dimana persentase pertambahan output harus lebih tinggi dari persentase pertumbuhan jumlah penduduk dan dalam jangka panjang ada kecenderungan bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.

Suatu negara atau daerah biasanya memfokuskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi didalam proses pembangunan yang dilaksanakan dan hal ini dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memang menjadi cita-cita adanya suatu negara yaitu mewujudkan kesejahteraan baik materil dan non materil sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan tentram, aman, damai dan sejahtera karena seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu kiranya mengambil langkah-langkah untuk membuat kebijakan-kebijakan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengena dan membawa kepada peningkatan perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang terus tinggi.

Susanti, Dkk (2000) menjelaskan bahwa salah satu indikator penting dalam menganalisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

### 2.2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Harrod-Domar (dalam Budiono, 1991) mengenai teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GNP ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional ( $s$ ) dan rasio modal-output nasional ( $k$ ). Dimana tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung/ secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan (semakin banyak bagian GNP yang ditabung dan diinvestasikan maka pada akhirnya nanti akan lebih besar lagi pertumbuhan GNP yang dihasilkan) sedangkan secara negatif/ berbanding terbalik terhadap rasio modal-output dari suatu perekonomian (semakin besar rasio modal-output nasional ( $k$ ) maka tingkat pertumbuhan GNP akan semakin rendah).

Asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar (dalam Budiono, 1991) tentang teorinya, yaitu :

- a. Tabungan nasional ( $s$ ) merupakan fungsi dari pendapatan nasional, dengan hubungan Positif :

$$S = s.Y \dots\dots\dots(2.1.)$$

- b. Investasi ( $I$ ) adalah perubahan dari stok barang modal ( $K$ ) :

$$I = \Delta K \dots\dots\dots(2.2.)$$

Dimana, jumlah stok barang modal ( $K$ ) mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output ( $Y$ ) sebagaimana ditunjukkan oleh rasio modal-output ( $k$ ) dalam persamaan berikut :

$$\frac{K}{Y} = k \quad \text{atau} \quad \frac{\Delta K}{\Delta Y} = k \dots\dots\dots(2.3.)$$

atau dapat ditulis :

$$\Delta K = k. \Delta Y \dots\dots\dots(2.4.)$$

- c. Jumlah keseluruhan dari tabungan nasional ( $S$ ) harus sama dengan keseluruhan investasi ( $I$ ), maka :

$$S = I \dots\dots\dots(2.5.)$$

Dari persamaan (2.1.), (2.2.) dan (2.4.) maka dapat ditulis :

$$S = s.Y = k. \Delta Y = \Delta K = I \dots\dots\dots(2.6.)$$

Atau disederhanakan menjadi :

$$s.Y = k. \Delta Y \dots\dots\dots(2.7.)$$

Persamaan (2.7.) masing-masing dibagi dengan (Y) dan

(k) maka menjadi :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \dots\dots\dots(2.8.)$$

dimana,  $\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$  merupakan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GDP.

Pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat jika perekonomian menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin *Gross National Product* (GNP) sehingga pertumbuhan maksimal dapat tercapai tentunya tergantung pada tingkat produktivitas investasi tersebut (tingkat produktivitas investasi adalah banyaknya tambahan output yang didapat dari satu unit investasi). Tetapi jika terjadi kondisi dimana permintaan lebih besar daripada penawaran agregat maka akan mendorong produsen untuk melakukan investasi baru dimana dengan adanya investasi baru berakibat menjauhi kondisi keseimbangan.

Hal itulah yang menjadi kelemahan pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-Domar dengan adanya ketidakstabilan dalam modelnya disebabkan asumsi-asumsi yang terlalu kaku/ rigiditas, selanjutnya munculah ekonom-ekonom neo klasik dengan memberikan fungsi produksi yang dapat mengakomodasi terjadinya substitusi antara modal dan tenaga kerja sehingga terjadi keseimbangan jangka panjang.

### 2.2.1.2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Model pertumbuhan neo klasik Solow yaitu :

$$Y = Ae^{ut} K^\alpha L^{1-\alpha} \dots\dots\dots(2.9.)$$

dimana :

Y = produk domestik bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non trampil

A = konstanta yang menunjukkan tingkat kemajuan teknologi

$\alpha$  = elastisitas output terhadap modal (persentase kenaikan PDB/ PDRB yang bersumber dari satu persen penambahan modal fisik dan modal manusia).

Asumsi-asumsi yang ada, yaitu :

1. Perekonomian berada pada kondisi *full employment*
2. Pasar bersifat *perfect competition*
3. Perekonomian hanya menghasilkan satu komoditas homogen
4. Biaya transportasi tidak ada
5. Fungsi produksi regional adalah identik yang memiliki sifat CRTS (*constant return to scale*)
6. Penawaran kerja tetap dan tidak ada kemajuan teknologi.

Asumsi dalam model neo klasik yaitu tidak terdapat gangguan dalam mobilitas faktor antar sektor dan informasi tentang harga faktor di semua sektor adalah sempurna, tenaga kerja akan masuk ke sektor yang paling tinggi tingkat upahnya sedangkan produsen akan mencari sektor yang paling menguntungkan untuk investasi mereka karena itu tenaga kerja dan modal akan bergerak ke sektor-sektor yang memberi tingkat pengembalian tertinggi.

Kelemahan model Solow, yaitu :

1. Belum dimasukkan adanya unsur eksternalitas
2. Asumsi hasil yang semakin menurun (*deminishing return*)
3. Asumsi skala produksi yang tetap (*constant return to scale*).

Implikasi dari asumsi diatas antara lain :

1. Akan terjadi proses perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi seiring waktu
2. Bersifat kaku dan terbatas dalam menjelaskan perbedaan pertumbuhan pendapatan per kapita antar negara
3. Investasi dalam jangka panjang tidak bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

### 2.2.2. PDRB

Raharja dan Manurung (2004) menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan nilai PDBR (*Product Domestik Bruto Riil*) atau disebut juga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu dengan rumus :

$$G_t = \frac{(PDBR - PDBR_{t-1})}{PDBR_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.12.)$$

Dimana :

$G_t$  = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan/ tahunan)

$PDBR_t$  = *Product Domestik Bruto Riil* periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDBR_{t-1}$  = PDBR satu periode sebelumnya

PDRB atas dasar harga berlaku adalah penjumlahan dari nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

PDRB atas dasar harga konstan adalah penjumlahan dari nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai dengan harga yang konstan (tetap) dengan dasar pada tahun tertentu.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan (2007) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu :

- a. Jika ditinjau dari sisi produksi disebut Produk Regional, merupakan jumlah nilai tambah (produk) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
- b. Jika ditinjau dari sisi pendapatan disebut Pendapatan Regional, merupakan jumlah penduduk (balas jasa) yang diterima oleh faktor-faktor produksi berupa upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
- c. Jika ditinjau dari segi pengeluaran disebut Pengeluaran Regional, merupakan jumlah pengeluaran konsumsi atau komponen permintaan akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah, pembentukan tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor netto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

### 2.2.3. Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Fungsi produksi agregat sering dipakai sebagai model pertumbuhan ekonomi hal ini didasarkan karena asumsi-asumsi yang mendasari fungsi produksi berlaku pula dalam model pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi dimana fungsi produksi merupakan gambaran hubungan teknis antara input dan output. Cobb-Douglas membuat rumus fungsi produksi adalah sebagai berikut :

$$Q = AK^\alpha L^\beta \dots\dots\dots(2.13)$$

Dari rumus fungsi produksi, Q menyatakan output atau hasil produksi, yang merupakan fungsi dari suatu indeks teknologi (A), capital atau modal (K) dan tenaga kerja (L). Sedangkan  $\alpha$  dan  $\beta$  adalah parameter model.

Soekartawi (1990) menyatakan bahwa penerapan fungsi produksi Cobb-Douglas dalam penelitian produksi pada dasarnya harus memperhatikan asumsi-asumsi dari fungsi produksi Cobb-Douglas dimana asumsi-asumsi dari fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut :

1. Karena dalam penyelesaiannya fungsi produksi ditransformasikan ke dalam bentuk *double log* maka tidak ada nilai pengamatan yang bernilai nol karena logaritma dari nol adalah *infinite*.
2. Dalam fungsi produksi perlu ada asumsi tidak ada perbedaan teknologi pada setiap pengamatan (*non-neutral difference in the respective technologies*). Ini artinya kalau fungsi Cobb-Douglas yang dipakai sebagai model dalam suatu pengamatan dan bila diperlukan analisis yang memerlukan lebih dari satu model maka perbedaan model tersebut terletak pada *intercept* dan bukan pada kemiringan garis (*slope*) model tersebut.
3. Tiap variabel bebas adalah *perfect competition*.
4. Perbedaan lokasi (pada fungsi produksi) seperti iklim adalah sudah tercakup pada faktor kesalahan (*error term*).

Lebih lanjut Soekartawi (1990) menjabarkan bahwa penerapan fungsi produksi Cobb-Douglas agar relevan dengan analisis ekonomi maka nilai hasil estimasi parameter ( $\alpha$  dan  $\beta$ ) harus positif dan lebih kecil dari satu. Ini artinya berlaku asumsi bahwa penggunaan fungsi Cobb-Douglas dalam keadaan hukum kenaikan yang semakin berkurang atau *the law of diminishing return* untuk setiap jenis input. Informasi yang

diperoleh diharapkan dapat dipakai untuk melakukan upaya agar setiap penambahan masukan produksi dapat menghasilkan produksi yang lebih besar lagi.

Soekartawi (1990) mengamati bahwa dalam banyak kenyataan, asumsi-asumsi sering dilupakan oleh para peneliti karena beberapa alasan antara lain :

1. Tidak diketahui secara pasti bagaimana sebenarnya keadaan usaha yang dilakukan, apakah dalam keadaan *decreasing*, *constant* atau *increasing of returns*.
2. Diharapkan pengaruh masing-masing masukan produksi dalam skala yang berbeda, misalkan fungsi Cobb-Douglas ditaksir begitu saja, dilihat bagaimana hasilnya kemudian dilakukan manipulasi terhadap besaran elastisitas, kemudian dilihat seterusnya bagaimana pengaruh dari berbagai manipulasi besaran elastisitas tersebut.
3. Fungsi Cobb-Douglas digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan fungsi pendugaan dengan model yang lain.

### 2.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti untuk meneliti pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Lopez, dkk (1998) dilakukan terhadap 70 negara sedang berkembang yang masuk dalam kategori negara berpendapatan sedang dan negara miskin. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor pertumbuhan di berbagai negara. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan model semi log. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi secara rata-rata menurun seiring dengan kenaikan dalam stok modal fisik. Hasil tersebut tidak terjadi pada negara yang memiliki rasio modal fisik dengan tenaga kerja rendah. Bagi negara yang memiliki rasio modal fisik dengan tenaga kerja rendah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh K.H. Zhang mengenai isu pertumbuhan di China dengan panel data dimana pertama kali diidentifikasi apakah ada pengaruh (positif atau negatif dari FDI (*Foreign Direct Investment*) di

perekonomian China. Data yang dipakai dari tahun 1992-2004 di Provinsi yang ada di China. Hasil penelitian bahwa FDI mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dan positif terhadap pertumbuhan.

Model penelitian :

$$Y = AL^{\beta_1}K^{\beta_2} \dots\dots\dots(2.14.)$$

$$A = B \left( 1 + \theta \left( \frac{F}{Y} \right) \right) F^{\alpha} \dots\dots\dots (2.15.)$$

Dimana :

Y = Output

L = Tenaga Kerja

K = Modal Dalam Negeri

F = FDI (*Foreign Direct Investment*)

A = Total Faktor Produksi

3. Penelitian yang dilakukan oleh B. Seetanah dan AJ Khadaroo yaitu meneliti pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan panel data dari 39 negara-negara Sub Saharan periode 1980-2000. Berdasarkan fungsi produksi Cobb Douglas, investasi terbagi tiga yaitu investasi swasta domestik, investasi asing langsung dan investasi publik yang dipakai dalam analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah elemen penting dalam mendorong pertumbuhan di negara-negara Sub Saharan.

Model penelitian :

$$Y_{it} = A_{it} K_{it}^{\beta_1} FDI_{it}^{\beta_2} G_{it}^{\beta_3} L_{it}^{\beta_4} \dots\dots\dots(2.16.)$$

Dimana :

Y = Output ekonomi

A = Faktor Technical (Asumsi Netral)

K = Investasi Domestik Swasta

FDI = Investasi Asing Langsung

G = Investasi Publik

L = Tenaga Kerja

$i$  = Jumlah *cross section* (1,2,3,...n)

$t$  = Jumlah waktu (1,2,3,...n)

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi-provinsi di Pulau Jawa (Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta) dengan panel data dari tahun 1990-2007 dengan memasukkan periode waktu yaitu dummy krisis yang dimulai dari tahun 1997 dengan model penelitian sebagai berikut :

$$Y = (X_1, X_2, X_3, X_4) \dots\dots\dots(2.17.)$$

$$PDRB_{it} = f (PMDN_{it}, PMA_{it}, TK_{it}, PERIODE_{it}) \dots\dots\dots(2.18.)$$

Dimana :

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri

PMA = Penanaman Modal Asing

TK = Tenaga Kerja

PERIODE = Periode Waktu (Dummy Krisis)

0 : 1990-1996

1 : 1997-2007

$i$  = Jumlah *cross section* (1,2,3,...n)

$t$  = Jumlah waktu (1,2,3,...n)

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Selama periode 2002-2006 jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan walaupun pertumbuhannya mengalami penurunan. Jumlah penduduk sekitar 8,50 juta jiwa pada tahun 2002 dan pada tahun 2006 menjadi 9,96 juta dan dalam lima tahun kedepan jumlahnya diperkirakan mencapai 9.1 juta orang. Dari sisi kepadatan penduduk pada tahun 2002 mencapai 12.664 penduduk per km<sup>3</sup>, tahun 2006 mencapai 13.545 penduduk per km<sup>3</sup> dan dalam lima tahun kedepan kepadatan penduduk diperkirakan mencapai 13.756 penduduk per km<sup>3</sup>. Laju pertumbuhan penduduk yang terjadi pada periode tahun 2002-2005 sebesar 1,06 persen per tahun dan rata-rata usia harapan hidup yaitu dari 72,79 tahun pada tahun 2002 menjadi 74,14 tahun pada tahun 2006.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yaitu dari Rp. 299,97 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp. 500,76 triliun pada tahun 2006 yang secara nominal mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa lainnya dalam perekonomian Jakarta masih mendominasi di samping sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

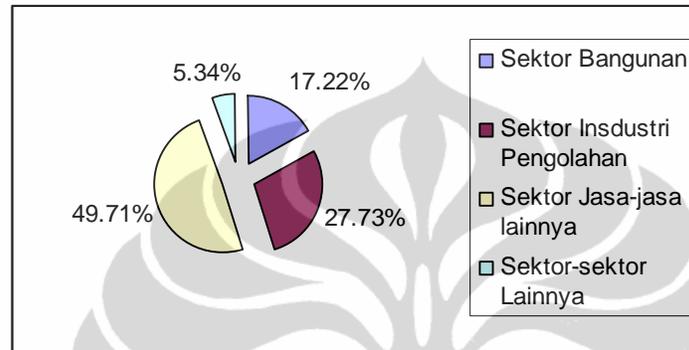
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yaitu Rp. 35,30 juta per kapita pada tahun 2002 yang meningkat menjadi Rp. 57,26 juta per kapita pada tahun 2006. PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 29,46 juta per kapita tahun 2002 menjadi Rp. 35,70 juta per kapita tahun 2007.

Dalam pembentukan PDRB peran sektor perdagangan dan jasa mencapai dari 70 persen. Sektor perdagangan dan jasa meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sekitar 20 persen; sektor jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sekitar 31 persen dan sisanya dari sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6 persen per tahun, jika pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi hanya 4,89 persen, maka pada tahun 2005 naik mencapai 6,01 persen dan tahun 2006 turun mencapai 5,90 persen.

PMDN yang terjadi di masing-masing provinsi yang ada di Pulau Jawa bervariasi penggunaannya di sektor-sektor yang ada seperti Provinsi DKI Jakarta, PMDN pada tahun 2007 terjadi di sektor jasa-jasa (49,71%), sektor industri pengolahan (27,73%), sektor bangunan (17,22%) dan sisanya sektor-sektor lain.

**Gambar 3.1.**

**Penyebaran PMDN di Sektor-Sektor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007**

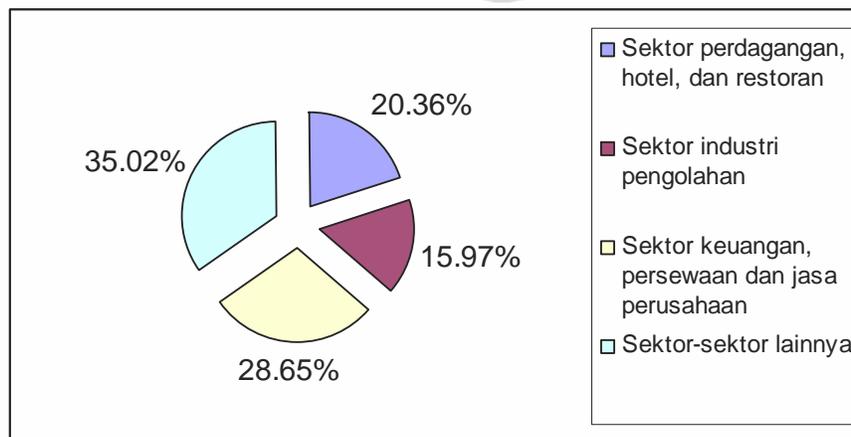


Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2008.

Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) provinsi DKI Jakarta pada tahun 2007 dimana sektor-sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (28,65 persen), sektor pendapatan, hotel dan restoran (20,36 persen) serta sektor industri pengolahan (15,97 persen) dan sisanya sektor-sektor lainnya.

**Gambar 3.2.**

**Kontribusi Sektor-sektor terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007**



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2008.

### 3.2. Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2002 Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk 37.548.565 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 1.033 jiwa/ km<sup>2</sup>. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat terendah dengan 2,02% per tahun dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional (2,14% per tahun).

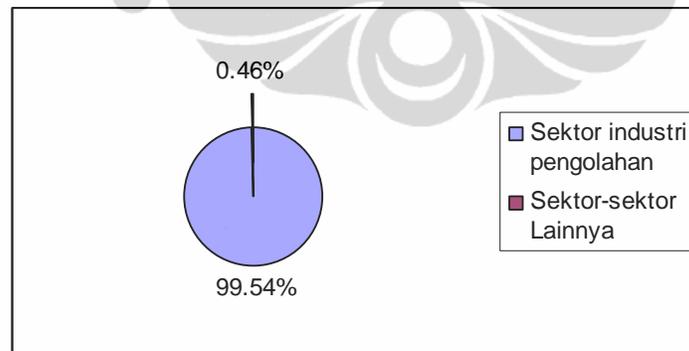
Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan karakteristik kontras dengan dua identitas masyarakat yaitu masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di Jabodetabek (wilayah Jakarta dan sekitarnya) yang mengakibatkan pertumbuhan urbanisasi di provinsi Jawa Barat tumbuh sangat cepat. Identitas masyarakat yang kedua yaitu masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan.

Provinsi Jawa Barat adalah termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam berupa alam dan pemandangan yang indah dan potensi-potensi yang dapat diberdayakan/ dimanfaatkan lebih lanjut berupa: sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya pesisir dan laut, sumber daya alam dan perekonomian lahan serta sumber daya perekonomian.

Provinsi Jawa Barat, PMDN pada tahun 2007 terjadi di sektor industri pengolahan (99,54 persen) dan sisanya sektor-sektor lainnya.

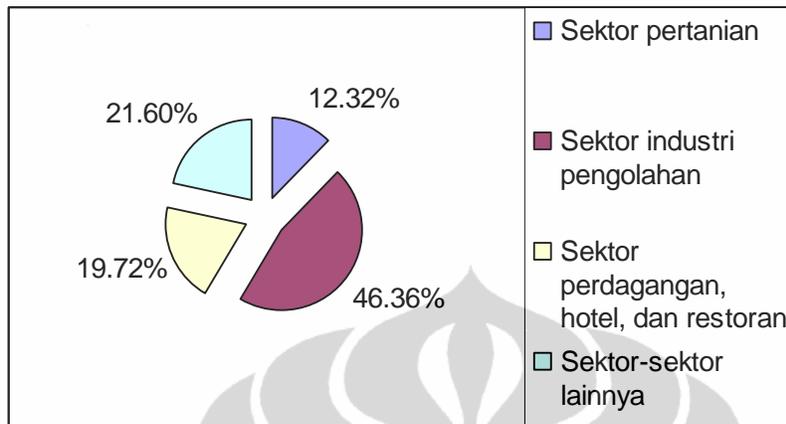
**Gambar 3.3.**

#### Penyebaran PMDN di Sektor-Sektor Provinsi Jawa Barat Tahun 2007



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2008.

Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 dimana sektor-sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor industri pengolahan (46,36 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,72 persen), sektor pertanian (12,32 persen) dan sisanya sektor lainnya.

**Gambar 3.4.****Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2007**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2008.

**3.3. Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2006, jumlah penduduk Jawa Tengah sebesar 32,00 juta jiwa (14,41% dari seluruh penduduk Indonesia sebesar 222,05 juta jiwa) atau meningkat 115,3 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 31,89 juta jiwa. Pada tahun 2006 tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 980 jiwa per km<sup>2</sup>.

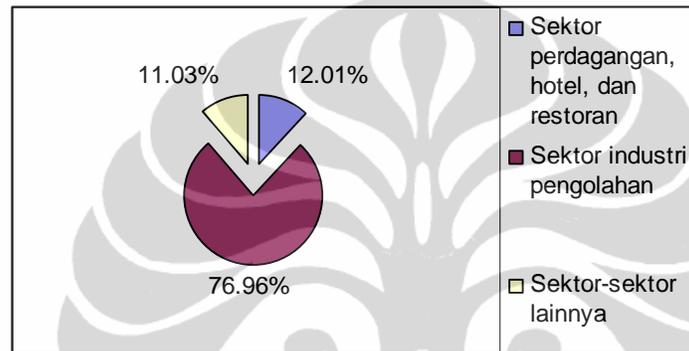
Provinsi Jawa Tengah memiliki kontur/ struktur daratan bergunung-gunung memiliki tanah yang cukup subur sehingga sangat cocok untuk budidaya tanaman hortikultura. Provinsi Jawa Tengah juga dialiri oleh 7 (tujuh) sungai sehingga sangat mendukung pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan Jawa Tengah akan beras termasuk mendukung kebutuhan beras nasional. Di beberapa daerah lainnya memiliki tanah tandus dan berkapur sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertambangan kapur dan semen sedangkan barang tambang seperti emas, tembaga, endesit dan pasir besi sudah diupayakan selain tanah liat, silica, marmer. Hutan yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah pun sangat luas sekitar 647.596,81 ha yang terdiri dari 573.241,63 ha hutan produksi, 73.477,88 ha hutan lindung dan 877,30 ha hutan wisata dan suaka alam yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Potensi lain yang dimiliki yaitu potensi air bawah tanah untuk keperluan air bersih, irigasi dan keperluan lainnya sedangkan potensi air permukaan sebesar 94.752,82 ribu m<sup>3</sup> per tahun yang diperoleh dari satuan wilayah

sungai (SWS) terdiri atas Cimanuk, Citanduy, Pemali Comal, Serayu, Jratunseluna dan Bengawan Solo.

Provinsi Jawa Tengah, PMDN pada tahun 2007 terjadi di sektor industri pengolahan (76,96 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (12,01 persen) dan sisanya sektor-sektor lainnya.

**Gambar 3.5.**

**Penyebaran PMDN di Sektor-Sektor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007**

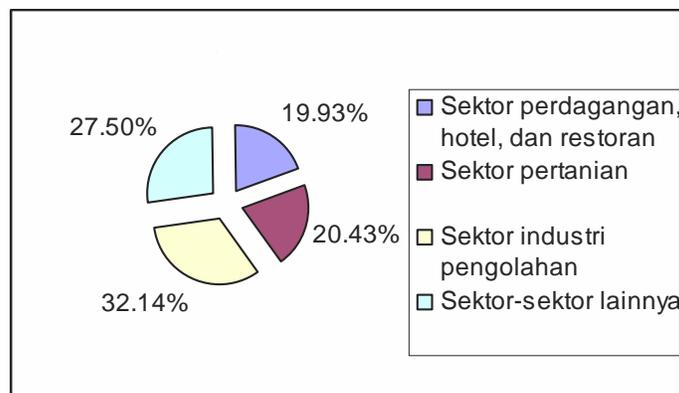


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2008.

Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 dimana sektor-sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor industri pengolahan (32,14 persen), sektor pertanian (20,43 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,93 persen) dan sisanya sektor-sektor lainnya.

**Gambar 3.6.**

**Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi Jawa tengah Tahun 2007**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2008.

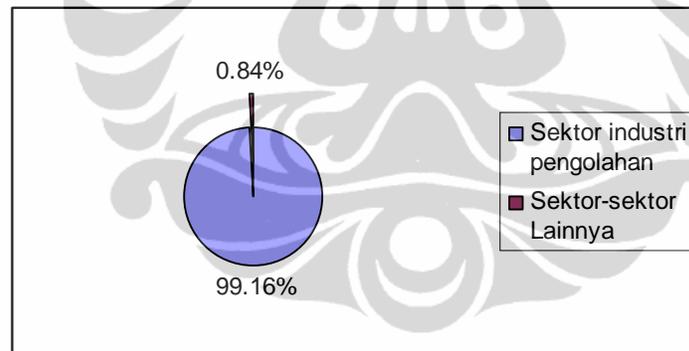
### 3.4. Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2005) memiliki jumlah penduduk sebesar 37.070.731 jiwa dengan kepadatan penduduk 794 jiwa per km<sup>2</sup> dan tingkat pertumbuhan penduduk Jawa Timur sebesar 1,09 % per tahun.

Provinsi Jawa Timur memiliki cadangan minyak bumi di Cepu dan cadangan gas alam di Bojonegoro, selain itu memiliki potensi dengan adanya cadangan mineral seperti batu alam, kalsite, fosfat, gypsum, pasir kuarsa, zeolit, dolomite, bentonit dan batu onyx sebesar 7.436,4 juta ton. Dengan keadaan alam yang dimiliki Provinsi Jawa Timur dapat dimanfaatkan untuk pengembangan potensi perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan.

Provinsi Jawa Timur, PMDN pada tahun 2007 terjadi di sektor industri pengolahan (99,16 persen) dan sisanya sektor-sektor lainnya.

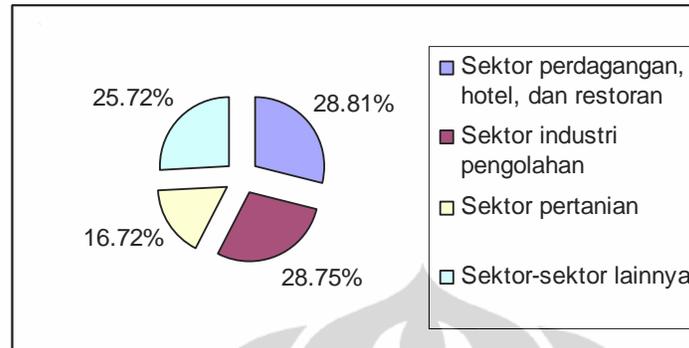
**Gambar 3.7.**  
**Penyebaran PMDN di Sektor-Sektor Provinsi Jawa Timur Tahun 2007**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2008.

Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007 dimana sektor-sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (28,81 persen), sektor industri pengolahan (28,75 persen), sektor pertanian (16,72 persen) dan sisanya sektor-sektor lainnya.

Gambar 3.8.

**Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2007**

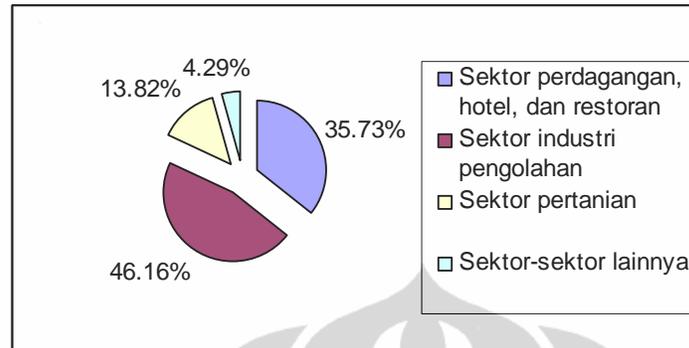
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2008.

**3.5. Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi DI Yogyakarta**

Provinsi DI Yogyakarta berdasarkan Susenas BPS tahun 2004, jumlah penduduk DI Yogyakarta tercatat sebanyak 3.220.808 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2004 adalah 0,42%, pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni sebesar 1,79% diikuti oleh Kabupaten Sleman (0,42%), Kabupaten Kulonprogo (0,19%), Kabupaten Gunung Kidul (0,16%) dan Kabupaten Bantul (0,07%). Dengan luas terkecil, Kota Yogyakarta justru memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 12.246 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul dengan luas terbesar menduduki peringkat terakhir kepadatan penduduk yaitu 462,33 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Kabupaten lainnya adalah Kabupaten Sleman 1.642 jiwa per km<sup>2</sup>, Kabupaten Bantul 1.610 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kabupaten Kulonprogo 641 jiwa per km<sup>2</sup>.

Provinsi DI Yogyakarta, PMDN pada tahun 2007 terjadi di sektor industri pengolahan (46,16 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (35,73 persen) dan sektor jasa-jasa (13,82 persen) dan sisanya sektor-sektor lainnya.

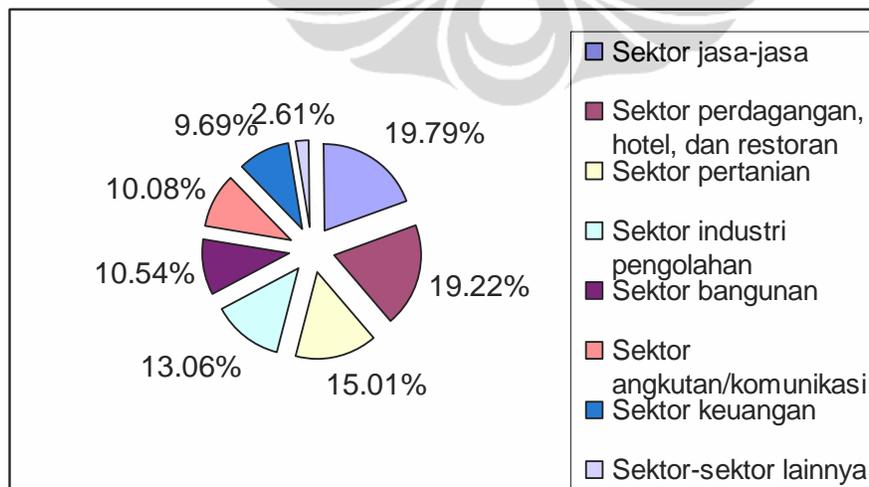
**Gambar 3.9.**  
**Penyebaran PMDN di Sektor-Sektor Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2007**



Sumber : BPS Provinsi DI Yogyakarta tahun 2008.

Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2007 dimana sektor-sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor jasa-jasa (19,79 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,22 persen), sektor pertanian (15,01 persen), sektor industri pengolahan (13,06 persen), sektor bangunan (10,54 persen), sektor angkutan/ komunikasi (10,08 persen), sektor keuangan (9,69 persen) dan sisanya sektor-sektor lainnya.

**Gambar 3.10.**  
**Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2007**



Sumber : BPS Provinsi DI Yogyakarta tahun 2008.

### 3.6. Kebijakan Pemerintah Terhadap Investasi

Kebijakan-kebijakan Pemerintah terhadap investasi diantaranya :

1. PP No. 20 Tahun 1994 tentang Rencana Kerja Pemerintah dimana pemerintah mengizinkan 100 persen kepemilikan asing dalam perusahaan PMA hampir di seluruh sektor baik kepada swasta asing dan nasional diberikan kesempatan untuk melakukan investasi di bidang pembangunan infrastruktur dengan porsi saham 95 persen boleh dimiliki oleh pihak asing. Sebelum adanya PP No. 20 Tahun 1994, untuk melakukan pekerjaan pembangunan infrastruktur hanya menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakannya

Kehadiran PP No. 20 Tahun 1994 ternyata telah memberikan dampak yang positif berupa peningkatan persetujuan PMA dari sebesar US \$ 8,2 miliar pada 1993 meningkat menjadi US \$ 23,7 miliar pada 1994 dan meningkat lagi menjadi US \$ 39,9 miliar pada 1995. Dalam tahun 1996 sampai dengan 5 oktober 1996, telah disetujui nilai investasi PMA sebesar US \$ 31,7 miliar Sementara untuk PMDN, dalam waktu yang sama, yaitu sampai dengan 5 Oktober 1996, telah disetujui sebesar Rp 89,3 triliun. Sebagai perbandingan dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah disetujui nilai investasi PMDN masing-masing Rp 39,4 triliun pada 1993, Rp 53,3 triliun pada tahun 1995 dan Rp 69,8 triliun pada tahun 1995. (Sastrowardoyo, Jawa Pos tahun 1996).

2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berwenang mengurus masalah penanaman modal, dijelaskan bahwa investasi langsung PMA dan PMDN bisa ditujukan untuk pendirian perusahaan (usaha) baru, perluasan usaha dan restrukturisasi usaha yang sudah ada.

Penanaman modal baru adalah penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitasnya yang dimaksudkan calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru. Perluasan penanaman modal adalah penambahan modal beserta fasilitasnya dalam

rangka penambahan kapasitas terpasang dan/ atau menambah jenis produksi barang/ jasa. Sedangkan restrukturisasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas.

3. Dalam Asian Development Bank Tahun 2005, dijelaskan bahwa untuk meningkatkan investasi, Pemerintah Indonesia menyadari perlunya memperbaiki berbagai aspek yang berkaitan dengan iklim investasi, seperti hal-kal yang berkaitan dengan :

a. Administrasi publik

Hal-hal yang dilakukan pemerintah yaitu telah memperbaiki undang-undang tentang kebangkrutan pada tahun 1998, mengagendakan perbaikan undang-undang tentang investasi walaupun belum selesai sampai sekarang. Dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan penghargaan atas kontrak kerja yang hingga kini masih menjadi masalah juga masalah pembedaan perlakuan antara perusahaan asing dan domestik di Indonesia.

b. Persaingan usaha

Dibuatnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dimaksudkan agar dengan adanya UU No. 5 Tahun 1999 dapat mencegah timbulnya monopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang merugikan bagi pasar sehingga dengan adanya perbaikan kondisi pasar akan menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

c. Infrastruktur

Ada beberapa kebijakan pemerintah berkenaan dengan Infrastuktur antara lain :

- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang memperkenalkan iklim kompetisi dan penentuan harga melalui mekanisme Pasar.
- UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mengatur tentang penggunaan air untuk irigasi, rumah tangga

dan industri dalam kaitannya dengan perlindungan dan sanitasi sumberdaya air.

- UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang bertujuan meningkatkan manajemen jalan dengan membuka kemungkinan partisipasi swasta di industri jalan tol.
- UU No. 3 Tahun 2005 tentang pembatalan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Kelistrikan oleh mahkamah institusi yang memungkinkan partisipasi swasta di bidang kelistrikan melalui kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

d. Pemerintahan

Ada beberapa kebijakan pemerintah berkenaan dengan pemerintahan antara lain :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyediakan secara lengkap sistem perencanaan, keuangan dan aspek administrasi dari manajemen keuangan pemerintah.

e. Telekomunikasi.

Dibuatnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang memberikan hak khusus kepada PT Indosat dan Satelindo untuk menyediakan jasa pelayanan telepon internasional dan PT Telkom untuk sambungan telepon darat dan domestik.

f. Korupsi

Ada beberapa kebijakan pemerintah berkenaan dengan korupsi antara lain :

- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Yang diharapkan mampu membantu menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.

g. Desentralisasi

Ada beberapa kebijakan pemerintah berkenaan dengan desentralisasi :

- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang Keseimbangan Fiskal antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Yang diharapkan dapat meningkatkan peranan dan kondisi daerah namun sayang dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah tambahan bagi kalangan pengusaha karena makin banyaknya peraturan dan pajak daerah yang menghambat perkembangan dunia usaha.

### 3.7. Kebijakan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja

Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap tenaga kerja diantaranya :

1. Penempatan TKI, mengenai pengaturannya ke negara manapun mengacu pada :
  - a. Permenaker nomor 02/Men/1994 tentang penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
  - b. Kepmenaker nomor 44/Men/1994 tentang Juklak Penempatan Naker di dalam dan luar negeri
  - c. Kepmenaker nomor 204/Men/1999 tentang penempatan TKI di luar negeri

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang TKI namun masih ada celah terbuka lebar bagi pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk melakukan manipulasi maupun kecurangan-kecurangan. Contoh nyata yaitu dalam ketentuan pasal 47 Ayat 2 Keputusan Menaker nomor 204/Men/1999 dimana dinyatakan bahwa pembiayaan yang dapat dibebankan kepada TKI adalah biaya dokumen jati diri tenaga kerja, tes kesehatan, transportasi lokal, akomodasi dan konsumsi serta uang jaminan

sesuai dengan negara tujuan. (Laily R., Malut Post, 18 Januari 2009).

2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana status kontrak dan *outsourcing* yang sangat diminati oleh para pengusaha karena lebih flexibel mengganti pekerja. Para pekerja/ buruh dengan status kontrak dan *outsourcing* sangat rentan untuk diganti karena itu mereka enggan menuntut upah yang lebih tinggi.
3. PermenakerTrans No. PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bertujuan membatasi pekerja asing yang bekerja di dalam negeri.



## **BAB IV**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **4.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan panduan bagi peneliti dalam melakukan penelitian karena berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan penelitian sangat tergantung pada metode penelitian yang dipergunakan. Begitu pentingnya metode penelitian karena dengan metode penelitian ini gejala-gejala dari objek yang diteliti dapat dirumuskan secara objektif dan rasional serta sistematis.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dimana dilakukan untuk memperoleh data, keterangan-keterangan serta fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data yang bersumber dari beberapa instansi seperti BPS (Badan Pusat Statistik), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sumber-sumber lainnya. Keterangan-keterangan serta fakta-fakta dilakukan dengan telaah dokumen yang bersumber dari literature berupa buku, majalah, koran, laporan, diktat, buletin, tulisan-tulisan ilmiah, surat keputusan, peraturan-peraturan perundangan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **4.2. Teknik Pengumpulan Data**

##### **4.2.1. Studi Kepustakaan**

Telaah Pustaka dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh landasan teori-teori yang mendukung tujuan penelitian seperti teori investasi, teori tenaga kerja serta teori pertumbuhan ekonomi.

##### **4.2.2. Telaah Dokumen**

Pengumpulan data-data sekunder yang dapat diperoleh dari sumber beberapa instansi yang telah dipublikasi dan data yang diolah kembali dari data sekunder diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga pemerintah yang diakui dan mempunyai kapasitas dalam menerbitkan data statistik seperti data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

#### **4.2.3. Definisi Operasional Variabel**

Agar Variabel yang diteliti lebih konsisten dengan permasalahan yang diteliti maka diberikan batasan ruang lingkup sebagai berikut :

##### **1. PDRB**

Pengertian PDRB adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu dalam satu tahun. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dipakai yaitu data PDRB di masing-masing provinsi yang ada di Pulau Jawa (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta). Data yang digunakan selama 18 tahun dari tahun 1990-2007 harga konstan tahun dasar tahun 2000 (satuan juta rupiah) yang ditunjukkan dari PDRB di masing-masing Provinsi yang ada di Pulau Jawa. Data diperoleh dari BPS Provinsi di Provinsi yang ada di Pulau Jawa.

##### **2. PMDN**

Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 adalah penggunaan daripada kekayaan seperti kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta nasional yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan kegunaan guna menjalankan sesuatu usaha. Data peroleh dari BPS provinsi di masing-masing provinsi yang ada di Pulau Jawa dari tahun 1990-2007 (satuan juta rupiah).

##### **3. PMA**

Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung dengan terdapat penyertaan modal (saham asing) digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Data tentang PMA

diperoleh dari BPS provinsi di masing-masing provinsi yang ada di Pulau Jawa dari tahun 1990-2007 (satuan ribu dolar).

#### 4. Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang mendukung faktor produksi dari tenaga kerja yang terserap di perusahaan-perusahaan yang ada di provinsi yang bersangkutan. Data tenaga kerja yang terserap diperoleh dari BPS provinsi di masing-masing provinsi yang ada di Pulau Jawa dari tahun 1990-2007 (satuan jiwa/ orang).

#### 5. Periode

Pengertian periode yaitu kondisi belum terjadinya krisis ekonomi yang ditunjukkan oleh angka 0 dan kondisi terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang ditunjukkan oleh angka 1 dimulai dari tahun 1997.

### 4.3. Spesifikasi Model

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mempertimbangkan keunggulan-keunggulan panel data akan digunakan regresi data panel dalam mengestimasi model yang ada. Spesifikasi model panel data yang akan diestimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 PMDN_{it} + \beta_2 PMA_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 PERIODE_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(4.1.)$$

Dimana :

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri

PMA = Penanaman Modal Asing

TK = Tenaga Kerja

PERIODE = Periode Waktu (Dummy Krisis)

0 : 1990-1996

1 : 1997-2007

$\beta_0$  = Konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \dots, \beta_n$  = Koefisien regresi

i = Jumlah *cross section* (1,2,3,...n)

t = Jumlah waktu (1,2,3,...n)

#### 4.4. Prosedur Pengolahan Data

##### 4.4.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui rata-rata dan standar deviation dari data yang tersedia dengan mempergunakan SPSS 15.0 *for windows*.

Tahapan pengujian yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui kondisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian untuk dianalisis. Dalam analisis deskriptif ditampilkan nilai-nilai dari seluruh variabel secara gabungan dan per wilayah.

##### 4.4.2. Analisis Regresi (*Cross Section OLS*)

Analisis regresi (*cross section OLS*) dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas dimana pengujian dilakukan dengan mempergunakan SPSS 15.0 *for windows*.

Suatu variabel X dan Y dapat dikatakan mempunyai hubungan fungsional apabila perubahan-perubahan pada variabel yang satu menentukan perubahan pada variabel yang lainnya. Variabel yang ditentukan atau diterangkan disebut dengan variabel tak bebas (*dependent variable*) sedangkan variabel yang menentukan atau menerangkan variabel lainnya disebut dengan variabel bebas (*independent variable*).

Adanya hubungan fungsional antara Y dengan  $X_1, X_2, \dots, X_k$  (dimana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel tak bebas) dapat dibuat dalam persamaan sebagai berikut :

$$PDRB = \beta_0 + \beta_1PMDN + \beta_2PMA + \beta_3TK + \beta_4PERIODE + e \dots\dots\dots(4.2.)$$

Proses selanjutnya perlu melakukan uji mengenai koefisien regresinya karena persamaan diatas belum boleh digunakan sebagai dasar kesimpulan. Terdapat 2 (dua) uji yaitu :

## 1. Uji keseluruhan parameter regresi

Hipotesis yang akan diuji adalah :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$H_1$  : Terdapat minimal satu parameter  $\beta$  yang tidak nol

Statistik uji :  $F = \text{RJK}_{\text{Regresi}} / \text{RJK}_{\text{Residu}}$

Kriteria Uji : Tolak  $H_0$  jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  dengan db  $(k, n - k - 1)$  pada taraf  $\alpha = 5\%$ )

## 2. Uji individu parameter regresi

Hipotesis yang akan diuji adalah :

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_1 : \beta \neq 0$$

$$\text{Statistik uji : } t = \frac{\beta}{s / \sqrt{S_{xx}}} \dots\dots\dots(4.3.)$$

$$\text{dimana : } s^2 = \frac{SS_{\text{Error}}}{n - 2} \dots\dots\dots(4.4.)$$

$$\text{dan } S_{xx} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \dots\dots\dots(4.5.)$$

Bila mempergunakan SPSS nilai t-hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$t = \frac{\beta}{\text{se}(\beta)} \dots\dots\dots(4.6.)$$

Kriteria uji :

Tolak  $H_0$  jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  dengan db  $= (n - 2)$  pada taraf  $\alpha = 5\%$ .

#### 4.4.3. Panel Data (*Common dan Fixed Effect*)

Verbeek (2000) mengatakan bahwa keuntungan regresi dengan data panel adalah kemampuan regresi data panel dalam mengidentifikasi parameter-parameter regresi secara pasti tanpa asumsi restriksi atau kendala. Model panel data adalah menggabungkan observasi lintas sektor dan runtun waktu sehingga jumlah observasi meningkat. Panel data akan meningkatkan derajat kebebasan, mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas dan memperbaiki efisiensi estimasi.

Baltagi (2001) menjelaskan keunggulan penggunaan data panel dibanding data runtun waktu dan data lintas sektor yaitu sebagai berikut :

1. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap unit.
2. Dengan data panel, data lebih informatif, mengurangi kolinieritas antara variabel, meningkatkan derajat kebebasan dan lebih efisien.
3. Data panel cocok digunakan untuk menggambarkan adanya dinamika perubahan.
4. Data panel dapat lebih mampu mendeteksi dan mengukur dampak.
5. Data panel bisa digunakan untuk studi dengan model yang lebih lengkap.
6. Data panel dapat meminimumkan bias yang mungkin dihasilkan dalam regresi.

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1PMDN_{it} + \beta_2PMA_{it} + \beta_3TK_{it} + \beta_4PERIODE_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(4.7.)$$

Panel data dianalisis dengan 2 (dua) pendekatan mendasar yang dapat digunakan, yaitu :

1. Pendekatan Fixed Effect.  
Pendekatan *fixed effect* yang mengasumsikan bahwa tidak ada *time specific effects* dan hanya memfokuskan pada *individual specific effects*.
2. Pendekatan Random Effect.  
Pendekatan *random effect* melibatkan korelasi antar error *term* karena berubahnya waktu maupun unit observasinya.

#### 4.4.4. Uji Chow

Pengujian dengan uji chow dilakukan untuk mengetahui model mana yang layak digunakan apakah menggunakan pendekatan *fixed effect* atau *random effect*.

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Gunakan model *common OLS*

$H_1$  : Gunakan model *fixed effect*

Statistik uji yang digunakan adalah :

$$F = \frac{(RRSS - URSS) / (N - 1)}{URSS / (NT - N - K)} \dots\dots\dots(4.8.)$$

- a. RRSS : Nilai *Sum Square Error* dari *Common OLS*
- b. URSS : Nilai *Sum Square Error* dari *Fixed Effect*
- c. N : Jumlah Unsur *Cross Section* (5 Provinsi)
- d. K : Jumlah Variabel Bebas (4 Variabel Bebas)
- e. T : Jumlah Unsur *Time Series* (18 Tahun)

Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

Tolak  $H_0$  jika nilai Chow yang diperoleh lebih besar dari nilai F tabel dengan derajat bebas sebesar :  $(N - 1; NT-N-K)$

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### 5.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yang dilakukan terhadap provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta) dimaksudkan untuk melihat rata-rata dari PDRB, PMDN, PMA, tenaga kerja di keseluruhan provinsi maupun masing-masing provinsi. Sedangkan penggunaan standar deviation dimaksudkan untuk melihat sejauhmana terjadinya penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya.

**Tabel 5.1.**  
**Descriptive Statistics Keseluruhan Provinsi**

	Mean	Std. Deviation
PMDN	2287109	3009839.355
PMA	4505453	6483031.398
TK	1E+007	6695851.960
PDRB	145301.9	104778.10182
Valid N (listwise)		

Keterangan (satuan) :

PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000

PMDN : Juta/ million (Rp)

PMA : Ribu/ thousand (US \$)

TK : Jiwa/ Orang

Dari tabel 5.1. dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta) diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 2287109, PMA sebesar 4505453, TK sebesar 10.000.000 dan PDRB sebesar 145301,9. Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 3009839,355; PMA sebesar 6483031,398; TK sebesar 6695851,960 dan PDRB sebesar 104778,10182.

Artinya bahwa nilai rata-rata PMDN keseluruhan provinsi yang ada di Pulau Jawa (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta) adalah sebesar 2287109 juta rupiah. Jika dilihat dari data yang ada mengenai PMDN keseluruhan provinsi di Pulau Jawa bahwa PMDN sebesar 2287109 juta rupiah terjadi di Provinsi Jawa Barat sekitar tahun 2002-2006. Nilai PMA sebesar 4505453 juta dolar, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMA keseluruhan provinsi di Pulau Jawa bahwa PMA sebesar 4505453 juta dolar terjadi di

Provinsi DKI Jakarta (tahun 1994), Provinsi Jawa Tengah (tahun 1998). TK sebesar 10.000.000 jiwa/ orang, jika dilihat dari data yang ada mengenai TK keseluruhan provinsi di Pulau Jawa bahwa TK sebesar 10.000.000 jiwa/ orang tidak terjadi karena khusus Provinsi DKI Jakarta jumlah tenaga kerjanya sangat jauh dibawah dibandingkan dengan 4 (empat) provinsi lainnya. PDRB sebesar 145301,9 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PDRB keseluruhan provinsi di Pulau Jawa bahwa PDRB sebesar 145301,9 juta rupiah terjadi di Provinsi Jawa Tengah sekitar tahun 2004-2007.

PDRB di Provinsi DKI Jakarta lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa (dapat dilihat data PDRB provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa), hal ini diakibatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis tentunya menjadi tempat bagi pelaku usaha untuk memproduksi menghasilkan produk dengan mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan pasar produk yang dihasilkannya dan juga dalam rangka penghematan biaya.

Untuk PMDN dan PMA, Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas dalam penyerapan PMDN dan PMA di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, hal ini dikarenakan banyaknya industri-industri yang dibangun di wilayah Provinsi Jawa Barat terutama didaerah sekitar jabodetabek yang memang diperuntukkan untuk industri karena semakin tidak memungkinkan lagi membangun industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pembentukan industri di sekitar wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan juga dalam upaya mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan pasar untuk menghemat biaya terutama transportasi.

Untuk tenaga kerja, Provinsi Jawa Barat pun juga menempati posisi teratas dalam penyerapan tenaga kerja yang terjadi di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Hal ini tidak terlepas dari masuknya PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Barat yang direalisasikan dalam pembentukan-pembentukan industri-industri baru yang membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

Nilai simpangan baku PMDN untuk keseluruhan provinsi sebesar 3009839,355 juta rupiah; PMA sebesar 6483031,398 juta dolar; TK sebesar 6695851,960 jiwa/ orang dan PDRB sebesar 104778,10182 juta rupiah.

Nilai simpangan baku yang terbesar yaitu untuk tenaga kerja, hal ini terjadi di Pulau Jawa bisa diakibatkan karena tenaga kerja yang ada di Pulau Jawa terutama di

industri sebagian besar adalah karyawan kontrak sehingga mudah sekali terjadi keluar masuknya pekerja. Jumlah para pencari kerja di Pulau Jawa sangat besar melebihi daya tampung yang ada sehingga pihak perusahaan menerapkan sistem kontrak untuk mengantisipasi pengeluaran (*cost*) yang membengkak apabila pekerjanya adalah karyawan tetap terutama dalam kondisi perusahaan sedang merugi. Jika pekerja adalah karyawan kontrak maka mudah bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja apabila kondisi perusahaan dalam keadaan merugi.

**Tabel 5.2.**  
**Descriptive Statistics<sup>a</sup> Provinsi DKI Jakarta**

	Mean	Std. Deviation
PMDN	3328251	2728383.369
PMA	8472369	7033202.856
TK	3202844	788338.35009
PDRB	226522.3	120132.81725
Valid N (listwise)		

a. Provinsi = DKI

Keterangan (satuan) :

PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000

PMDN : Juta/ million (Rp)

PMA : Ribu/ thousand (US \$)

TK : Jiwa/ Orang

Dari tabel 5.2. untuk Provinsi DKI Jakarta diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 3328251, PMA sebesar 8472369, TK sebesar 3202844 dan PDRB sebesar 226522,3. Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 2728383,369; PMA sebesar 7033202,856; TK sebesar 788338,35009 dan PDRB sebesar 120132,81725.

Artinya dari Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 3328251 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMDN Provinsi DKI Jakarta, PMDN sebesar 3328251 juta rupiah terjadi di tahun 2003. PMA sebesar 8472369 juta dolar, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMA Provinsi DKI Jakarta, PMA sebesar 8472369 juta dolar terjadi di tahun 1999 dan 2006). TK sebesar 3202844 jiwa/ orang, jika dilihat dari data yang ada mengenai TK Provinsi DKI Jakarta, TK sebesar 3202844 jiwa/ orang terjadi di tahun 1995 dan 2002). PDRB sebesar 226522,3 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PDRB Provinsi DKI Jakarta, PDRB sebesar 226522,3 juta rupiah terjadi di tahun 2000).

PMDN, PMA dan tenaga kerja Provinsi DKI Jakarta dibandingkan Provinsi Jawa Barat memang masih dibawah, hal ini bisa diakibatkan kondisi yang tidak

memungkinkan lagi terjadi pembangunan industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi sekarang ini di Provinsi DKI Jakarta sudah sangat padat terutama untuk pemukiman sehingga pembentukan industri baru tidak dapat dilakukan lagi apalagi dengan adanya industri menimbulkan dampak polusi dan limbah yang bisa merugikan bagi pemukiman.

Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 2728383,369 juta rupiah; PMA sebesar 7033202,856 juta dolar; TK sebesar 788338,35009 jiwa/ orang dan untuk PDRB sebesar 120132,81725 juta rupiah.

Nilai simpangan baku yang terbesar yaitu untuk PMA, hal ini terjadi di Provinsi DKI Jakarta bisa diakibatkan karena PMA sangat tergantung dari kondisi politik dan keamanan sedangkan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara sering terjadi kondisi politik dan keamanan yang tidak kondusif sehingga minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi DKI Jakarta tiap tahunnya sangat berfluktuasi disesuaikan dengan apa yang sedang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 5.3.**  
**Descriptive Statistics<sup>a</sup> Provinsi Jawa Barat**

	Mean	Std. Deviation
PMDN	5032806	4168900.094
PMA	9271310	6240128.024
TK	2E+007	1964766.261
PDRB	191267.8	67769.42540
Valid N (listwise)		

a. Provinsi = JABAR

Keterangan (satuan) :  
 PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000  
 PMDN : Juta/ million (Rp)  
 PMA : Ribu/ thousand (US \$)  
 TK : Jiwa/ Orang

Dari tabel 5.3. untuk Provinsi Jawa Barat diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 5032806, PMA sebesar 9271310, TK sebesar 2.000.000 dan PDRB sebesar 191267,8. Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 4168900,094; PMA sebesar 6240128,024; TK sebesar 1964766,261 dan PDRB sebesar 67769,42540.

Artinya dari Provinsi Jawa Barat dapat diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 5032806 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMDN Provinsi Jawa Barat, PMDN sebesar 5032806 juta rupiah terjadi di tahun 1998. PMA sebesar 9271310 juta dolar, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMA Provinsi

Jawa Barat, PMA sebesar 9271310 juta dolar terjadi di tahun 2002. TK sebesar 20.000.000 jiwa/ orang, jika dilihat dari data yang ada mengenai TK Provinsi Jawa Barat, TK sebesar 20.000.000 jiwa/ orang terjadi di tahun 2007. PDRB sebesar 191267,8 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PDRB Provinsi Jawa Barat, PDRB sebesar 191267,8 juta rupiah terjadi di tahun 1999 dan 2000.

Untuk PMDN, PMA dan tenaga kerja, Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas dalam penyerapan PMDN, PMA dan tenaga kerja, hal ini dikarenakan banyaknya industri-industri yang dibangun di wilayah Provinsi Jawa Barat terutama didaerah sekitar Jabodetabek yang memang diperuntukkan untuk industri karena semakin tidak memungkinkan lagi membangun industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pembentukan industri di sekitar wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan juga dalam upaya mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan pasar untuk menghemat biaya terutama transportasi. Adanya pembentukan industri-industri baru di Provinsi Jawa Barat mengakibatkan terjadi kebutuhan akan pekerja untuk bekerja di industri-industri yang baru tersebut, inilah yang mengakibatkan terjadinya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 4168900,094 juta rupiah; PMA sebesar 6240128,024 juta dolar; TK sebesar 1964766,261 jiwa/ orang dan PDRB sebesar 67769,42540 juta rupiah.

Nilai simpangan baku yang terbesar yaitu untuk PMA, hal ini terjadi di Provinsi Jawa Barat bisa diakibatkan karena PMA sangat tergantung dari kondisi politik dan keamanan seperti halnya yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta jika sering terjadi kondisi politik dan keamanan yang tidak kondusif dapat mengakibatkan minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Barat menjadi menurun, disamping itu faktor-faktor lainnya seperti kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi seperti perizinan dan sebagainya juga berpengaruh terhadap minat para investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 5.4.**  
**Descriptive Statistics<sup>a</sup> Provinsi Jawa Tengah**

	Mean	Std. Deviation
PMDN	774830.8	681906.86151
PMA	616590.1	918990.79598
TK	1E+007	895173.86788
PDRB	105678.3	38747.11432
Valid N (listwise)		

a. Provinsi = JATENG

Keterangan (satuan) :

PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000

PMDN : Juta/ million (Rp)

PMA : Ribu/ thousand (US \$)

TK : Jiwa/ Orang

Dari tabel 5.4. untuk Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 774830,8; PMA sebesar 616590,1; TK sebesar 1E+007 dan PDRB sebesar 105678,3. Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 681906,86151; PMA sebesar 918990,79598; TK sebesar 895173,86788 dan PDRB sebesar 38947,11432.

Artinya dari Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 774830,8 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMDN Provinsi Jawa Tengah, PMDN sebesar 774830,8 juta rupiah terjadi di tahun 2001. PMA sebesar 616590,1 juta dolar, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMA Provinsi Jawa Tengah, PMA sebesar 616590,1 juta dolar terjadi di tahun 2004. TK sebesar 10.000.000 jiwa/ orang, jika dilihat dari data yang ada mengenai TK Provinsi Jawa Tengah, TK sebesar 10.000.000 jiwa/ orang tidak terjadi karena jumlah tenaga kerjanya diatas 13.000.000 jiwa/ orang. PDRB sebesar 105678,3 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PDRB Provinsi Jawa Tengah, PDRB sebesar 105678,3 juta rupiah terjadi di tahun 1998.

PMDN, PMA dan tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Jawa Barat memang masih dibawah, hal ini bisa diakibatkan lokasi Provinsi Jawa Tengah yang jauh dari pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang juga pasar produk yang potensial yaitu Provinsi DKI Jakarta sehingga para investor lebih memilih Provinsi Jawa barat yang lebih dekat dengan Provinsi DKI Jakarta untuk menanamkan investasinya baik PMDN maupun PMA. Dengan kurangnya penyerapan PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah berakibat penyerapan Tenaga kerja pun turut berkurang.

Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 681906,86151 juta rupiah; PMA sebesar 918990,79598 juta dolar; TK sebesar 895173,86788 jiwa/ orang dan PDRB sebesar 38947,11432 juta rupiah.

Nilai simpangan baku yang terbesar yaitu untuk PMA, hal ini terjadi di Provinsi Jawa Tengah seperti yang terjadi di provinsi lainnya bisa diakibatkan karena PMA sangat tergantung dari kondisi politik dan keamanan sehingga jika sering terjadi kondisi politik dan keamanan yang tidak kondusif dapat menurunkan minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor lainnya juga berpengaruh terhadap minat para investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah seperti kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi seperti perizinan dan sebagainya, karena jika perizinan berbelit-belit dan banyak biaya-biaya tentunya akan membuat para investor ragu untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 5.5.**  
**Descriptive Statistics<sup>a</sup> Provinsi Jawa Timur**

	Mean	Std. Deviation
PMDN	2197816	2344263.492
PMA	4105958	7278184.537
TK	2E+007	948802.25268
PDRB	190913.4	71009.20170
Valid N (listwise)		

a. Provinsi = JATIM

Keterangan (satuan) :  
 PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000  
 PMDN : Juta/ million (Rp)  
 PMA : Ribu/ thousand (US \$)  
 TK : Jiwa/ Orang

Dari tabel 5.5. untuk Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 2197816, PMA sebesar 4105958, TK sebesar 20.000.000 dan PDRB sebesar 190913,4. Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 2344263,492; PMA sebesar 7278184,537; TK sebesar 948802,25268 dan PDRB sebesar 71009,20170.

Artinya dari Provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 2197816 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMDN Provinsi Jawa Timur, PMDN sebesar 2197816 juta rupiah terjadi di tahun 1997. PMA sebesar 4105958 juta dolar, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMA Provinsi Jawa Timur, PMA sebesar 4105958 juta dolar terjadi di tahun 1999. TK sebesar 20.000.000 jiwa/ orang, jika dilihat dari data yang ada mengenai TK Provinsi Jawa

Timur, TK sebesar 20.000.000 jiwa/ orang tidak terjadi karena jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur sekitar 15.000.000-17.000.000 jiwa/ orang. PDRB sebesar 190913,4 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PDRB Provinsi Jawa Timur, PDRB sebesar 190913,4 juta rupiah terjadi di tahun 1994.

PMDN, PMA dan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur dibandingkan Provinsi Jawa Barat memang masih dibawah, hal ini bisa diakibatkan lokasi Provinsi Jawa Timur seperti halnya Provinsi Jawa Tengah yang jauh dari pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang juga pasar produk yang potensial yaitu Provinsi DKI Jakarta sehingga para investor lebih memilih Provinsi Jawa barat yang lebih dekat dengan Provinsi DKI Jakarta untuk menanamkan investasinya baik PMDN maupun PMA. Penyerapan Tenaga kerja pun turut berkurang di Provinsi Jawa Timur diakibatkan kurangnya penyerapan PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Timur.

Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 2344263,492 juta rupiah; PMA sebesar 7278184,537 juta dolar; TK sebesar 948802,25268 jiwa/ orang dan PDRB sebesar 71009,20170 juta rupiah.

Nilai simpangan baku yang terbesar yaitu untuk PMA, hal ini terjadi di Provinsi Jawa Timur seperti yang terjadi di provinsi lainnya bisa diakibatkan karena PMA sangat tergantung dari kondisi politik dan keamanan, minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Timur akan menurun jika kondisi politik dan keamanan tidak kondusif. Faktor-faktor lainnya seperti kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi seperti perizinan dan sebagainya, juga berpengaruh terhadap minat para investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Timur karena akan membuat para investor ragu untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Timur jika perizinan berbelit-belit dan banyak biaya-biaya.

**Tabel 5.6.**  
**Descriptive Statistics<sup>a</sup> Provinsi DI Yogyakarta**

	Mean	Std. Deviation
PMDN	101841.1	162915.04463
PMA	61038.32	89429.42438
TK	1576351	106471.82954
PDRB	12127.44	5080.86395
Valid N (listwise)		

a. Provinsi = YOGYA

Keterangan (satuan) :

PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000

PMDN : Juta/ million (Rp)

PMA : Ribu/ thousand (US \$)

TK : Jiwa/ Orang

Dari tabel 5.6. untuk Provinsi DI Yogyakarta diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 101841,1; PMA sebesar 61038,32; TK sebesar 1576351 dan PDRB sebesar 12174,44. Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 162915,04463; PMA sebesar 89429,42438; TK sebesar 106471,82954 dan PDRB sebesar 5080,86395.

Artinya dari Provinsi DI Yogyakarta dapat diketahui bahwa nilai rata-rata PMDN sebesar 101841,1 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMDN Provinsi DI Yogyakarta, PMDN sebesar 101841,1 juta rupiah terjadi di tahun 2000. PMA sebesar 61038,32 juta dolar, jika dilihat dari data yang ada mengenai PMA Provinsi DI Yogyakarta, PMA sebesar 61038,32 juta dolar terjadi di tahun 2002. TK sebesar 1576351 jiwa/ orang, jika dilihat dari data yang ada mengenai TK Provinsi DI Yogyakarta, TK sebesar 1576351 jiwa/ orang terjadi di tahun 1990-1994. PDRB sebesar 12174,44 juta rupiah, jika dilihat dari data yang ada mengenai PDRB Provinsi DI Yogyakarta, PDRB sebesar 12174,44 juta rupiah terjadi di tahun 1998 dan 1999.

Untuk PMDN, PMA dan tenaga kerja, Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi terbawah dalam penyerapan PMDN, PMA dan tenaga kerja, hal ini dikarenakan Provinsi DI Yogyakarta dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa adalah provinsi yang lebih kecil baik dari luas wilayah, jumlah penduduk sehingga memang kurang menjadi daerah untuk pembentukan-pembentukan industri dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa sehingga penyerapan PMDN, PMA dan tenaga kerja sangat jauh dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa.

Nilai simpangan baku untuk PMDN sebesar 162915,04463 juta rupiah; PMA sebesar 89429,42438 juta dolar; TK sebesar 106471,82954 jiwa/ orang dan PDRB sebesar 5080,86395 juta rupiah.

Nilai simpangan baku yang terbesar yaitu untuk PMDN, berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa, hal ini terjadi di Provinsi DI Yogyakarta karena di Provinsi DI Yogyakarta banyak terjadi investasi dari dalam negeri terutama di bidang pariwisata dan kondisi pariwisata di Provinsi DI Yogyakarta sangat tergantung pada musim-musim tertentu seperti musim libur sekolah sehingga hanya waktu-waktu tertentu di Provinsi DI Yogyakarta ramai wisatawan dan di waktu-waktu lainnya sepi wisatawan. Hal inilah yang mengakibatkan investasi terutama dari dalam negeri berfluktuasi terjadi di Provinsi DI Yogyakarta.

Dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, rata-rata PMDN yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 5032806 juta rupiah dan yang terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 101841,1 juta rupiah. Hal ini terjadi karena Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi yang dekat dengan ibukota negara (Provinsi DKI Jakarta) adalah alternatif untuk menanamkan PMDN karena di Provinsi DKI Jakarta sekarang ini sudah tidak memungkinkan membangun industri baru sehingga para investor banyak yang menanamkan investasinya di wilayah sekitar Provinsi DKI Jakarta yaitu wilayah Provinsi Jawa Barat sedangkan Provinsi DI Yogyakarta terendah dalam penyerapan PMDN karena memang Provinsi DI Yogyakarta bukan tempat yang cocok untuk membangun industri-industri karena lokasinya lebih cocok untuk pengembangan pariwisata sehingga jumlah PMDN yang masuk ke Provinsi DI Yogyakarta pun terbatas dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa.

Dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, rata-rata PMA yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 9271310 juta rupiah dan yang terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 61038,32 juta rupiah. Seperti halnya yang terjadi dengan PMDN begitu pula yang terjadi dengan PMA tidak berbeda jauh dimana karena lokasi Provinsi Jawa Barat yang dekat dengan ibukota negara (Provinsi DKI Jakarta) sehingga menjadi tempat memungkinkan membangun industri karena dekatnya dengan pusat pemerintahan dan pusat bisnis sedangkan Provinsi DI Yogyakarta terendah dalam penyerapan PMA disamping lokasinya jauh dari Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis juga hanya berpotensi untuk pariwisata dan kurang diminati untuk pembangunan industri dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa.

Dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, rata-rata tenaga kerja yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 16587253 jiwa/ orang dan yang terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1576351 jiwa/ orang. Hal ini terjadi karena di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk paling besar diantara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, penyerapan tenaga kerja pun lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa terutama di pertanian dan di industri sedangkan Provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling kecil diantara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa tentunya penyerapan tenaganya pun

paling kecil dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa karena memang di Provinsi DI Yogyakarta sedikit sekali jumlah industri yang ada sehingga penyerapan tenaga kerja pun sedikit jumlahnya dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa.

Dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, rata-rata PDRB yang tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 226522,3 juta rupiah dan yang terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 12127,44 juta rupiah. Hal ini terjadi karena memang Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis sehingga menjadi tempat bagi para pengusaha untuk berusaha terutama di perdagangan dan jasa yang sangat mendukung PDRB Provinsi DKI Jakarta sedangkan Provinsi DI Yogyakarta terendah dalam penyerapan PDRB karena Provinsi DI Yogyakarta adalah provinsi dengan jumlah industri yang sedikit sehingga PDRB Provinsi DI Yogyakarta pun menjadi lebih kecil dibandingkan PDRB provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa.

Dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, nilai simpangan baku untuk PMDN yang terbesar adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 4168900,094 dan yang terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 162915,04463. Hal ini terjadi di Provinsi Jawa Barat karena PMDN yang terjadi sangat berfluktuatif dimana di tahun-tahun tertentu (tahun 1993-1996, 2002) banyak terjadi masuknya PMDN sedangkan di tahun-tahun lainnya (tahun 1990, 2001) sedikit sekali masuknya PMDN, hal ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan juga pengaruh yang terjadi di Indonesia seperti kondisi politik, keamanan yang mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan investasinya sedangkan kondisi di Provinsi DI Yogyakarta dimana kondisi politik, keamanan relatif lebih stabil karena jauh dari pusat pemerintahan dan pusat bisnis (Provinsi DKI Jakarta) berakibat kecilnya nilai simpangan baku PMDN yang terjadi.

Dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, nilai simpangan baku untuk PMA yang terbesar adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 7278184,537 dan yang terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 61038,32. Hal ini terjadi di Provinsi Jawa Timur karena di tahun-tahun tertentu (tahun 2000) PMA yang masuk besar jumlahnya sedangkan di tahun-tahun lainnya (tahun 1990, 1991, 2002) sedikit sekali PMA yang masuk, hal ini diakibatkan minat investor asing untuk menanamkan investasinya di

Provinsi Jawa Timur tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur baik kondisi politik, keamanan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk investasi terutama untuk investasi asing (PMA) sedangkan kondisi di Provinsi DI Yogyakarta relatif lebih stabil kondisi politik, keamanan disamping memang minat investor asing menanamkan investasinya di Provinsi DI Yogyakarta sangat kurang dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, nilai simpangan baku untuk tenaga kerja yang terbesar adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 6240128,024 dan yang terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 106471,82954. Hal ini terjadi di Provinsi Jawa Barat karena pekerja yang ada di Provinsi Jawa Barat hampir sebagian besar karyawan kontrak di industri sehingga mudah keluar masuknya pekerja di industri belum lagi dengan naik turunnya investasi di Provinsi Jawa Barat juga mengakibatkan penyerapan tenaga kerja mengalami naik turun sedangkan di Provinsi DI Yogyakarta relatif stabil penyerapan tenaga kerja yang terjadi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa karena memang di Provinsi DI Yogyakarta sedikit sekali terdapat industri.

Dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, nilai simpangan baku untuk PDRB yang terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 120132,81725 dan yang terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 5080,86395. Hal ini terjadi di Provinsi DKI Jakarta karena memang kedudukan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis tentunya sangat tergantung sekali dengan situasi dan kondisi politik, keamanan. Jika kondisi politik, keamanan relatif stabil maka bisnis (terutama perdagangan dan jasa) yang berlangsung di Provinsi DKI Jakarta akan turut stabil sehingga PDRB yang dihasilkan pun akan tinggi dan sebaliknya jika kondisi politik, keamanan kurang kondusif akan berakibat bisnis (terutama perdagangan dan jasa) turut terpengaruh yang akibatnya mempengaruhi terhadap PDRB menjadi semakin berkurang sedangkan di Provinsi DI Yogyakarta kondisi politik, keamanan relatif lebih stabil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa sehingga PDRB yang dihasilkan Provinsi DI Yogyakarta relatif lebih stabil.

## 5.2. Analisis Regresi (*Cross Section OLS*)

Analisis regresi (*cross section OLS*) dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel bebas (PMDN, PMA, tenaga kerja dan periode) terhadap PDRB dimana diperoleh hasil estimasi regresi sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = 26624,873 + 0,013 \text{ PMDN} + 0,005 \text{ PMA} + 0,003 \text{ TK} + 52411,119 \text{ PERIODE} \dots(5.1.)$$

Adapun besar pengaruh yang diberikan variabel PMDN, PMA, TK dan periode terhadap PDRB ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.7.**  
**Model Summary Hubungan Variabel**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 <sup>a</sup>	.543	.522	72448.06321

a. Predictors : (Constant), PERIODE, PMDN, TK, PMA

Keterangan (satuan) :

PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000

PMDN : Juta/ million (Rp)

PMA : Ribu/ thousand (US \$)

TK : Jiwa/ Orang

Periode : Dummy Krisis (0 : 1990-1996; 1 : 1997-2007)

Dari tabel 5.7. terlihat bahwa nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,737 atau sama dengan 73,7%. Sedangkan nilai R-Kuadrat (R-Squared) yang diperoleh adalah sebesar 0,543 atau sama dengan 54,3%. Keadaan ini menunjukkan bahwa PMDN, PMA, TK dan Periode memberikan kontribusi pengaruh sebesar 54,3% terhadap PDRB. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara PMDN, PMA, TK dan Periode terhadap PDRB.

**Tabel 5.8.**  
**Pengujian ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.3E+011	4	1.327E+011	25.289	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4.5E+011	85	5248721863		
	Total	9.8E+001	89			

a. Predictors : (Constant), PERIODE, PMDN, TK, PMA

b. Dependent Variable : PDRB

Keterangan (satuan) :  
 PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000  
 PMDN : Juta/ million (Rp)  
 PMA : Ribu/ thousand (US \$)  
 TK : Jiwa/ Orang  
 Periode : Dummy Krisis (0 : 1990-1996; 1 : 1997-2007)

Metode Analisis Regresi yang digunakan dalam pengujian memberikan hasil yang signifikan yaitu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari PMDN, PMA, TK dan Periode terhadap PDRB. Hasil pengujian Anova memberikan nilai statistik F yang cukup besar hingga diperoleh nilai signifikansi yang nyata. Nilai F yang diperoleh adalah sebesar 25,289 dengan nilai signifikan sebesar 0,000.

**Tabel 5.9.**  
**Coefficients<sup>a</sup> Hasil Pengujian Individual**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26624.873	17082.438		1.559	.123
	PMDN	.013	.003	.381	4.532	.000
	PMA	.005	.001	.333	3.863	.000
	TK	.003	.001	.198	2.630	.010
	PERIODE	52411.119	17049.504	.245	3.074	.003

a. Dependent Variable : PDRB

Keterangan (satuan) :  
 PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000  
 PMDN : Juta/ million (Rp)  
 PMA : Ribu/ thousand (US \$)  
 TK : Jiwa/ Orang  
 Periode : Dummy Krisis (0 : 1990-1996; 1 : 1997-2007)

Sedangkan hasil pengujian secara individual menunjukkan hasil yang signifikan untuk parameter yang sedang diuji. Nilai t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t-tabel yaitu sebesar 4,532 untuk variabel PMDN; 3,863 untuk variabel PMA; 2,630 untuk variabel TK dan 3,074 untuk variabel Periode. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk variabel PMDN; 0,000 untuk variabel PMA; 0,010 untuk variabel TK dan 0,003 untuk variabel Periode dimana nilai-nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Periode, PMDN, TK dan PMA berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari PMDN terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,013. Nilai tersebut menunjukkan

bahwa semakin tinggi PMDN maka akan semakin tinggi nilai PDRB. Koefisien sebesar 0,013 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan PMDN sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,013 juta rupiah.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari PMA terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,005. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi PMA maka akan semakin tinggi nilai PDRB. Koefisien sebesar 0,005 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan PMA sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,005 juta rupiah.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Tenaga Kerja terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,010. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,003. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Tenaga Kerja maka akan semakin tinggi nilai PDRB. Koefisien sebesar 0,003 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tenaga kerja sebesar 1 jiwa/ orang maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,003 juta rupiah.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Periode waktu terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,003. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 52411,119. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setelah krisis, rata-rata PDRB meningkat sebesar 52411,119 juta rupiah dibandingkan dengan sebelum krisis.

### **5.3. Panel Data (*Common dan Fixed Effect*)**

Pengujian dilakukan dengan panel data yang merupakan gabungan antara data *time series* dengan *cross section* dengan mempergunakan 2 (dua) pendekatan yaitu *common* dan *fixed effect*. Pendekatan *common* tidak memperhatikan dimensi individu (*cross section*) maupun waktu (*time series*) karena diasumsikan bahwa perilaku data antar provinsi sama dalam berbagai kurun waktu sedangkan pendekatan *fixed effect* dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan antar provinsi karena karakteristik ekonomi per provinsi yang ada di Pulau Jawa diperkirakan berbeda-beda. Karakteristik daerah dianggap ada disebabkan banyak hal-hal yang menentukan diluar model yang ditangkap oleh intersep.

Pada model *fixed effect*, efek individu atau efek waktu yang tidak diteliti diasumsikan merupakan parameter yang tetap (*fixed*) dan diasumsikan bahwa hanya unsur intersep yang berbeda antar individu sedangkan koefisien kemiringan dari variabel bebas adalah sama.

Jadi, dalam *fixed effect* dapat diketahui : 1). Adanya heterogenitas dalam variabel yang dipengaruhi (PDRB). 2). Adanya heterogenitas dampak faktor diluar variabel yang mempengaruhi (dalam model yaitu PMDN, PMA, tenaga kerja dan periode) yang seharusnya mempengaruhi variabel yang dipengaruhi (PDRB) padahal diasumsikan ceteris paribus (tetap), faktor diluar tersebut sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain-lainnya diluar model. 3). heterogenitas yang terjadi ini sama sepanjang waktu. 4). Bisa dibandingkan antar intersep untuk melihat mana yang paling besar, paling kecil dan sebagainya.

Dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil estimasi regresi sebagai berikut (Lampiran 4) :

***Common***

$$\text{PDRB} = 26624,87 + 0,013247 \text{ PMDN} + 0,005385 \text{ PMA} + 0,003095 \text{ TK} + 52411,12 \text{ PERIODE} \dots\dots(5.2.)$$

Apabila diasumsikan bahwa perilaku data antar provinsi di Pulau Jawa sama dalam berbagai kurun waktu maka setiap peningkatan PMDN seluruh provinsi di Pulau Jawa sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa sebesar 0,013247 juta rupiah, setiap peningkatan PMA seluruh provinsi di Pulau Jawa sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa sebesar 0,005385 juta rupiah dan setiap peningkatan tenaga kerja seluruh provinsi di Pulau Jawa sebesar 1 jiwa/ orang maka akan meningkatkan PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa sebesar 0,003095 juta rupiah sedangkan dampak periode terhadap PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa adalah sebesar 52411,12 juta rupiah setelah krisis dibandingkan dengan sebelum krisis.

Apabila dimungkinkan PMDN, PMA dan tenaga kerja bernilai sama dalam berbagai kurun waktu maka nilai PDRB dimana diasumsikan perilaku data antar provinsi sama dalam berbagai kurun waktu adalah sebesar 26624,87 juta rupiah.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari PMDN terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000.

Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,013247. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi PMDN maka akan semakin tinggi nilai PDRB. Koefisien sebesar 0,013247 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan PMDN sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,013247 juta rupiah.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari PMA terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0002. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,005385. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi PMA maka akan semakin tinggi nilai PDRB. Koefisien sebesar 0,005385 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan PMA sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,005385 juta rupiah.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Tenaga Kerja terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0101. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,003095. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Tenaga Kerja maka akan semakin tinggi nilai PDRB. Koefisien sebesar 0,003095 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tenaga kerja sebesar 1 jiwa/ orang maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,003095 juta rupiah.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Periode waktu terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0028. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 52411,12. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setelah krisis, rata-rata PDRB meningkat sebesar 52411,12 juta rupiah dibandingkan dengan sebelum krisis.

### *Fixed Effect*

DKI

$$\text{PDRB} = 71595,36 + 0,011086 \text{ PMDN} + 0,002129 \text{ PMA} + 0,0025212 \text{ TK} \\ + 31484,07 \text{ PERIODE} \dots\dots\dots(5.3.)$$

JABAR

$$\text{PDRB} = -306033,0 + 0,011086 \text{ PMDN} + 0,002129 \text{ PMA} + 0,0025212 \text{ TK} \\ + 31484,07 \text{ PERIODE} \dots\dots\dots(5.4.)$$

## JATENG

$$\begin{aligned} \text{PDRB} &= -289366,0 + 0,011086 \text{ PMDN} + 0,002129 \text{ PMA} + 0,0025212 \text{ TK} \\ &+ 31484,07 \text{ PERIODE} \dots\dots\dots(5.5.) \end{aligned}$$

## JATIM

$$\begin{aligned} \text{PDRB} &= -279625,4 + 0,011086 \text{ PMDN} + 0,002129 \text{ PMA} + 0,0025212 \text{ TK} \\ &+ 31484,07 \text{ PERIODE} \dots\dots\dots(5.6.) \end{aligned}$$

## YOGYA

$$\begin{aligned} \text{PDRB} &= 48114,07 + 0,011086 \text{ PMDN} + 0,002129 \text{ PMA} + 0,0025212 \text{ TK} \\ &+ 31484,07 \text{ PERIODE} \dots\dots\dots(5.7.) \end{aligned}$$

Jika diasumsikan bahwa *effect* PMDN, PMA, Tenaga Kerja dan Periode sama untuk setiap provinsi dan diasumsikan rata-rata PDRB tiap provinsi adalah berbeda maka dampak setiap peningkatan PMDN sebesar 1 juta rupiah di seluruh provinsi terhadap PDRB di seluruh provinsi adalah sebesar 0,011086 juta rupiah dan dampak setiap peningkatan Tenaga Kerja sebesar 1 jiwa/ orang di seluruh provinsi terhadap PDRB di seluruh provinsi adalah sebesar 0,0035212 juta rupiah sedangkan dampak Periode terhadap PDRB adalah sebesar 31484,07 juta rupiah setelah krisis dibandingkan sebelum krisis. Sementara PMA tidak significant terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Rata-rata PDRB Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 71595,36 juta rupiah, rata-rata PDRB Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 306033,0 juta rupiah, rata-rata PDRB Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 289366,0 juta rupiah, rata-rata PDRB Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 279625,4 juta rupiah dan rata-rata PDRB Provinsi DI Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 48114,07 juta rupiah.

Bilamana ada perubahan PMDN, PMA dan tenaga kerja antar provinsi maupun antar waktu maka Provinsi DKI Jakarta akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 377628,36 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 16667 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa

Timur akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 26407,6 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi DI Yogyakarta akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 354147,07 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.

Terdapat tiga pengujian yang digunakan dalam mendeteksi model yang baik dalam penelitian ini. Ketiga model tersebut menunjukkan hasil yang signifikan yaitu, pada model yang menggunakan OLS biasa, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keempat variabel bebas yang digunakan dalam memprediksi PDRB menunjukkan hasil yang signifikan dimana keempat variabel yang digunakan memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan besar pengaruh yang diperoleh adalah sebesar 0,543 atau sebesar 54,3%.

Pada model yang menggunakan *Common OLS*, dimana hanya terdapat satu buah *intercept*, hasil yang diperoleh menunjukkan signifikansi yang baik dengan nilai pengaruh juga sebesar 54,3% namun nilai Durbin Watson yang sangat kecil mengindikasikan adanya Autokorelasi. Berdasarkan hasil ini maka dilakukan pengulangan analisis dengan memasukkan unsur AR(1) atau yang juga disebut model Dynamic.

Model autoregresif tingkat pertama (*autoregressive*) disingkat AR (1) adalah model yang paling umum digunakan untuk menjelaskan masalah hubungan antara variabel gangguan yang satu dengan variabel gangguan yang lain. Model AR (1) variabel gangguan ( $e_t$ ) hanya tergantung dari variabel gangguan sebelumnya ( $e_{t-1}$ ). Model AR (1) dapat ditulis sebagai berikut :

$$e_{it} = \rho e_{it-1} + v_{it} \quad -1 < \rho < 1 \dots\dots\dots(5.8.)$$

$\rho$  (rho) adalah parameter yang menjelaskan hubungan antara variabel gangguan  $e_t$ . Variabel gangguan  $v_t$  diasumsikan mempunyai rata-rata nol atau  $E(v_t) = 0$ , mempunyai varian yang konstan atau  $\text{Var}(v_t) = \sigma^2$  dan tidak mengandung unsur autokorelasi atau  $\text{Cov}(v_t, v_{t+1}) = 0$ . Jika  $\rho = 0$  maka  $e_t = v_t$  sehingga variabel gangguan didalam persamaan tersebut tidak saling berhubungan atau tidak ada autokorelasi.

Agar autokorelasi hilang, maka diasumsikan ada keterkaitan residu antar waktu pada daerah yang sama karena adanya ketidaktepatan PDRB yang dihasilkan

dengan PDRB yang diharapkan dimana PDRB yang diharapkan ditentukan oleh variabel PMDN, PMA, tenaga kerja dan periode.

Pada pengulangan model, dari empat variabel yang menjadi variabel bebas, hanya tiga variabel saja yang signifikan yaitu PMDN, TK dan PERIODE sementara PMA tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Nilai pengaruh yang diberikan ketiga variabel tersebut sebesar 84,4% yang lebih tinggi dari nilai sebelumnya, dimana hasil estimasi regresi sebagai berikut (Lampiran 4) :

**Common**

$$\text{PDRB} = 312538,0 + 0,005822 \text{ PMDN} + 1,08 \text{ PMA} + 0,022352 \text{ TK} + 73697,21 \text{ PERIODE} \\ + 0,970955 \text{ AR}(1) \dots\dots\dots(5.9.)$$

Apabila diasumsikan bahwa perilaku data antar provinsi di Pulau Jawa sama dalam berbagai kurun waktu maka setiap peningkatan PMDN seluruh provinsi di Pulau Jawa sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa sebesar 0,005822 juta rupiah, setiap peningkatan tenaga kerja seluruh provinsi di Pulau Jawa sebesar 1 jiwa/ orang maka akan meningkatkan PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa sebesar 0,022352 juta rupiah sedangkan dampak periode terhadap PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa adalah sebesar 73697,21 juta rupiah setelah krisis dibandingkan dengan sebelum krisis. Sementara PMA tidak significant terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Apabila dimungkinkan PMDN, PMA dan tenaga kerja bernilai sama dalam berbagai kurun waktu maka nilai PDRB dimana diasumsikan perilaku data antar provinsi sama dalam berbagai kurun waktu adalah sebesar 312538,971 juta rupiah (diperoleh dari penjumlahan 312538,0 ditambah 0,970955 AR(1)).

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari PMDN terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0014. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,005822. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi PMDN maka akan semakin tinggi nilai PDRB. Koefisien sebesar 0,005822 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan PMDN sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,005822 juta rupiah.

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari PMA terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,9988.

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan PMA tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap PDRB.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Tenaga Kerja terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0031. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,022352. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Tenaga Kerja maka akan semakin tinggi nilai PDRB. Koefisien sebesar 0,022352 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tenaga kerja sebesar 1 jiwa/ orang maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,022352 juta rupiah.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Periode waktu terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0005. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 73697,21. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setelah krisis, rata-rata PDRB meningkat sebesar 73697,21 juta rupiah dibandingkan dengan sebelum krisis.

Pada model yang menggunakan *Fixed Effect*, dimana setiap *Cross Section term* memiliki *intercept*, hasil yang diperoleh menunjukkan signifikansi yang baik dengan nilai pengaruh sebesar 77,68% namun nilai Durbin Watson yang masih rendah dapat menjadi indikasi ada masalah dengan Autokorelasi. Berdasarkan hasil ini maka dilakukan juga pengulangan analisis dengan memasukkan unsur AR (1) atau yang juga disebut model Dynamic.

Pada pengulangan model, dari empat variabel yang menjadi variabel bebas, hanya tiga variabel saja yang signifikan yaitu PMDN, TK dan PERIODE sementara PMA tidak punya pengaruh signifikan terhadap PDRB. Nilai pengaruh yang diberikan ketiga variabel tersebut sebesar 87,46% yang lebih besar dari nilai sebelumnya.

### ***Fixed Effect***

DKI

$$\text{PDRB} = 209189,2 + 0,005032 \text{ PMDN} + 0,000142 \text{ PMA} + 0,031660 \text{ TK} \\ + 55105,47 \text{ PERIODE} + 0,729634 \text{ AR}(1) \dots\dots\dots(5.10.)$$

JABAR

$$\text{PDRB} = -300556,8 + 0,005032 \text{ PMDN} + 0,000142 \text{ PMA} + 0,031660 \text{ TK} \\ + 55105,47 \text{ PERIODE} + 0,729634 \text{ AR}(1) \dots\dots\dots(5.11.)$$

## JATENG

$$\begin{aligned} \text{PDRB} = & -306449,0 + 0,005032 \text{ PMDN} + 0,000142 \text{ PMA} + 0,031660 \text{ TK} \\ & + 55105,47 \text{ PERIODE} + 0,729634 \text{ AR}(1) \dots\dots\dots(5.12.) \end{aligned}$$

## JATIM

$$\begin{aligned} \text{PDRB} = & -278362,2 + 0,005032 \text{ PMDN} + 0,000142 \text{ PMA} + 0,031660 \text{ TK} \\ & + 55105,47 \text{ PERIODE} + 0,729634 \text{ AR}(1) \dots\dots\dots(5.13.) \end{aligned}$$

## YOGYA

$$\begin{aligned} \text{PDRB} = & 7490,487 + 0,005032 \text{ PMDN} + 0,000142 \text{ PMA} + 0,031660 \text{ TK} \\ & + 55105,47 \text{ PERIODE} + 0,729634 \text{ AR}(1) \dots\dots\dots(5.14.) \end{aligned}$$

Jika diasumsikan bahwa effect PMDN, PMA, Tenaga Kerja dan Periode sama untuk setiap provinsi dan diasumsikan rata-rata PDRB tiap provinsi adalah berbeda maka dampak setiap peningkatan PMDN sebesar 1 juta rupiah di seluruh provinsi terhadap PDRB di seluruh provinsi adalah sebesar 0,005032 juta rupiah dan dampak setiap peningkatan Tenaga Kerja sebesar 1 jiwa/ orang di seluruh provinsi terhadap PDRB di seluruh provinsi adalah sebesar 0,031660 juta rupiah sedangkan dampak Periode terhadap PDRB adalah sebesar 55105,47 juta rupiah setelah krisis dibandingkan sebelum krisis. Sementara PMA tidak significant terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Rata-rata PDRB Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 209189,2 juta rupiah, rata-rata PDRB Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 300556,8 juta rupiah, rata-rata PDRB Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 306449,0 juta rupiah, rata-rata PDRB Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 278362,2 juta rupiah dan rata-rata PDRB Provinsi DI Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 7490,487 juta rupiah.

Bilamana ada perubahan PMDN, PMA dan tenaga kerja antar provinsi maupun antar waktu maka Provinsi DKI Jakarta akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 515638,2 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Barat akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 5892,2 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi

Jawa Timur akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 28086,8 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi DI Yogyakarta akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 313939,487 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari PMDN terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0064. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,005032. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi PMDN maka akan semakin tinggi nilai PDRB. Koefisien sebesar 0,005032 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan PMDN sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,005032 juta rupiah.

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari PMA terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,8514. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan PMA tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap PDRB.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Tenaga Kerja terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0001. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,031660. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Tenaga Kerja maka akan semakin tinggi nilai PDRB. Koefisien sebesar 0,031660 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tenaga kerja sebesar 1 jiwa/ orang maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,031660 juta rupiah.

Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Periode waktu terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000. Koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 55105,47. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setelah krisis, rata-rata PDRB meningkat sebesar 55105,47 juta rupiah dibandingkan dengan sebelum krisis.

Dari tiga model dimana *common* OLS sama baiknya dengan OLS biasa maka hanya diperlukan satu pengujian untuk menentukan model mana yang layak untuk digunakan, yaitu dengan melakukan Uji Chow.

#### 5.4. Uji Chow

Pengujian yang dilakukan dengan uji chow adalah bertujuan untuk memperoleh model mana yang layak digunakan dalam penelitian ini apakah dengan mempergunakan pendekatan *fixed effect* atau *common effect*. Hasil pengujian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.10.**  
**Pengujian Chow**

UJI	NILAI		F-Hitung
Chow	RRSS	1.42E+11	4.974
	URSS	1.14E+11	
	N	5	
	T	18	
	K	4	

Uji	F Test	F Tabel		Hasil		Kesimpulan
Uji Chow	4.974	$\alpha = 0,01$	3.5600	F Test > F Tabel	HO Ditolak	<b>Fixed Effect</b>
		$\alpha = 0,05$	2.4844			
		$\alpha = 0,10$	2.0156			

Berdasarkan pada hasil pengujian chow dimana hasil F Test (4.974) > F Tabel (2.4844) dengan  $\alpha = 0,05$  (5%) yang berarti HO ditolak maka disimpulkan bahwa metode yang lebih baik adalah yang menggunakan metode *Fixed Effect*.

#### 5.5. Model Terbaik (*Fixed Effect*)

Dari hasil regresi diperoleh model terbaik *fixed effect* yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antar provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa karena karakteristik ekonomi per provinsi yang ada di Pulau Jawa diperkirakan berbeda-beda disebabkan ada hal-hal yang menentukan diluar model yang ditangkap oleh intersep.

Terdapat lima buah intersep sesuai dengan jumlah *cross section* yang diikutsertakan dalam model *fixed effect* ini. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai intersep lebih tinggi dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Jawa. Ini dapat diartikan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Jawa. Hal ini bisa terjadi karena Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara

yang merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian tentunya mempunyai nilai lebih dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa sehingga Provinsi DKI Jakarta menjadi sasaran utama dari para pelaku ekonomi untuk berusaha dan menanamkan investasinya serta memasarkan produknya karena nilai daya beli yang cukup tinggi di Provinsi DKI Jakarta. Para pekerja pun berlomba-lomba untuk bekerja dan memperoleh penghasilan di Provinsi DKI Jakarta akibatnya PDRB di Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa.

### **5.6. Pengaruh PMDN terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa**

Berdasarkan hasil regresi pengaruh PMDN terhadap PDRB provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa signifikan yang artinya terdapat pengaruh PMDN terhadap PDRB sesuai dengan teori pertumbuhan dimana investasi dapat meningkatkan output. Dengan adanya PMDN di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa terbukti dapat meningkatkan PDRB di provinsi-provinsi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari gambar 3.1. sampai 3.10. dimana penggunaan PMDN di sektor-sektor yang ada di provinsi-provinsi di Pulau Jawa sedikit banyak turut menyumbang terhadap kontribusi sektor-sektor (yang merupakan sumber PDRB) yang ada di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jadi, dapat dibuktikan bahwa kondisi nyata yang terjadi sesuai dengan apa yang diperoleh dari hasil regresi dimana PMDN berpengaruh terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Dari kondisi yang terjadi di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta) dimana penyebaran PMDN di sektor-sektor sesuai dengan kondisi sektor-sektor yang menyumbang kontribusi PDRB masing-masing provinsi menunjukkan seperti halnya hasil regresi dimana PMDN mempengaruhi PDRB. Contoh lain seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dengan adanya kebijakan PP No. 20 Tahun 1994 tentang Rencana Kerja Pemerintah ternyata telah memberikan dampak yang positif berupa peningkatan persetujuan investasi (kenaikan investasi). Dengan adanya kenaikan investasi ini mengakibatkan terjadi peningkatan PDRB provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Paling tidak dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi turut pula merangsang para investor untuk

menanamkan investasinya karena merasa ada dukungan dari pemerintah. Apalagi sudah banyak sekali peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendukung bagi penarikan investasi karena memang pemerintah (baik pusat maupun daerah) menyadari bahwa investasi dapat meningkatkan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

### **5.7. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa**

Berdasarkan hasil regresi pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa signifikan yang artinya terdapat pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa sesuai dengan teori pertumbuhan dimana tenaga kerja dapat meningkatkan output. Dengan adanya tenaga kerja di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa terbukti dapat meningkatkan PDRB provinsi-provinsi tersebut. Hal ini dapat dilihat dimana penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang ada di provinsi-provinsi di Pulau Jawa sedikit banyak turut menyumbang terhadap kontribusi sektor-sektor (yang merupakan sumber PDRB) yang ada di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi, dapat dibuktikan bahwa kondisi nyata yang terjadi sesuai dengan apa yang diperoleh dari hasil regresi dimana tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Berbeda halnya dengan investasi, perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja masih sedikit sekali padahal tenaga kerja adalah faktor yang berpengaruh terhadap PDRB. Undang-undang ketenagakerjaan yang ada sedikit sekali berpihak kepada pekerja, hal ini mungkin diakibatkan karena begitu besarnya angkatan kerja kita sehingga memiliki nilai tawar yang rendah. Pemerintah harus terus memperhatikan keberadaan para pekerja sehingga tenaga kerja yang ada bisa terus menyokong keberlangsungan peningkatan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa, apalagi berdasarkan hasil regresi bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai pembuat kebijakan untuk memperhatikan keberadaan tenaga kerja dalam mendukung peningkatan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Walaupun masih sedikit sekali perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja tetapi pemerintah secara bertahap mulai membuat aturan untuk kepentingan pekerja karena pemerintah pun menyadari bahwa potensi tenaga kerja sangat besar sekali bagi peningkatan PDRB terutama di Pulau Jawa dan hal ini sudah seharusnya dilakukan

pemerintah untuk melindungi para pekerja sehingga pekerja dapat mengoptimalkan potensi dan kapasitasnya sehingga dengan semakin meningkatnya produktifitas pekerja karena didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan pekerja akan berpengaruh terhadap peningkatan PDRB terutama di Pulau Jawa yang besar sekali tenaga kerja yang tersedia.

### 5.8. Pengaruh Periode Waktu (Dummy Krisis) terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa

Berdasarkan hasil regresi bahwa terdapat pengaruh signifikan dari periode waktu (dummy krisis) terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa dimana kondisi yang terjadi setelah krisis yang melanda sejak tahun 1997 sedikit banyak berpengaruh terhadap penyerapan PMDN, PMA dan tenaga kerja di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, terbukti dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi di bawah minus 10 di masing-masing provinsi dan secara perlahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mulai bergerak ke kisaran 3-10 persen. Hal ini membuktikan bahwa memang setelah krisis PDRB di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa (Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta) mengalami kenaikan PDRB.

**Tabel 5.11.**

#### **PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa sejak Krisis Ekonomi Tahun 1997 Tahun Dasar 2000 (Juta Rupiah/ Million Rupiahs)**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB DKI</b>	<b>PDRB JABAR</b>	<b>PDRB JATENG</b>	<b>PDRB JATIM</b>	<b>PDRB YOGYA</b>
1997	265,529.49	251,702.87	120,831.64	231,358.77	14,219.00
1998	219,089.22	206,963.72	106,642.86	194,062.73	12,628.77
1999	218,458.11	187,952.94	110,366.83	196,417.48	12,961.38
2000	227,924.12	195,753.03	114,701.31	202,830.06	13,480.60
2001	238,673.94	203,369.00	118,816.40	210,448.57	14,056.32
2002	250,331.16	209,731.19	123,038.54	218,452.39	14,687.28
2003	263,624.24	219,525.22	129,166.46	228,884.46	15,360.41
2004	278,524.82	230,003.50	135,789.87	242,228.89	16,146.42
2005	295,270.54	242,883.88	143,051.21	256,374.73	16,910.88
2006	312,826.71	257,499.45	150,682.65	271,249.32	17,535.75
2007	332,971.26	273,995.14	159,110.25	287,814.18	18,291.51

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Indonesia tahun 2008.

Dari tabel 5.11. terlihat setelah krisis tahun 1997, PDRB di masing-masing provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami penurunan dan secara perlahan-lahan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2007. Mulai awal tahun 2000 kondisi perekonomian secara perlahan mulai membaik ditandai mulai Bergeraknya kembali PMDN dan penyerapan tenaga kerja sehingga turut mendukung peningkatan PDRB yang terjadi.

### **5.9. Pengaruh PMA terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa**

Berdasarkan hasil regresi bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari PMA terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa artinya PMA yang terjadi di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa dapat dikatakan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa karena menurut berbagai pendapat baik dari akademisi maupun pejabat yang terkait dengan PMA di Pulau Jawa maupun nasional, dikatakan bahwa di Pulau Jawa, PMA sudah mengalami kejenuhan artinya tidak memiliki dampak yang mendukung peningkatan PDRB seperti diketahui untuk membangun industri di Pulau Jawa sekarang ini sudah mengalami keterbatasan lahan sehingga industrialisasi di Pulau Jawa menjadi terhambat padahal industri adalah salah satu sektor yang besar peranan dan kontribusinya terhadap peningkatan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jadi, hasil yang diperoleh dari regresi dimana PMA tidak berpengaruh terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa sesuai dengan kenyataan yang terjadi dimana Pulau Jawa sudah tidak memungkinkan membangun industri karena semakin berkurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan industri.

Belum lagi sekarang ini investasi asing lebih banyak kearah pembangunan mall, hotel, perumahan yang sedikit sekali mendukung bagi Bergeraknya peningkatan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang didominasi oleh perdagangan, jasa serta industri. Walaupun tidak signifikan mendukung PDRB di Pulau Jawa tetapi keberadaan PMA sedikit banyak turut menyumbang bagi pembangunan di Pulau Jawa (tetap ada peran dalam pembangunan walaupun hanya sedikit).

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan regresi dimulai dari analisis regresi (*cross section* OLS) dilanjutkan dengan panel data (*common* dan *fixed effect*) diperoleh model terbaik (*fixed effect*). Pada model *fixed effect* dilihat apakah terdapat perbedaan antar provinsi di Pulau Jawa karena karakteristik ekonomi per provinsi yang ada di Pulau Jawa diperkirakan berbeda-beda disebabkan ada hal-hal yang menentukan diluar model yang ditangkap oleh intersep. Ada lima intersep yang berbeda, penjelasannya yaitu sebagai berikut : rata-rata PDRB Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 209189,2 juta rupiah, rata-rata PDRB Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 300556,8 juta rupiah, rata-rata PDRB Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 306449,0 juta rupiah, rata-rata PDRB Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 278362,2 juta rupiah dan rata-rata PDRB Provinsi DI Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 1990-2007 adalah sebesar 7490,487 juta rupiah.
2. Dalam *fixed effect* dapat dilihat perbandingan antar intersep satu dengan yang lainnya penjelasannya yaitu bilamana ada perubahan PMDN, PMA dan tenaga kerja antar provinsi maupun antar waktu maka Provinsi DKI Jakarta akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 515638,2 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Barat akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 5892,2 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 28086,8 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi DI Yogyakarta akan mendapatkan pengaruh individu terhadap PDRB lebih besar 313939,487 juta rupiah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

3. Jika diasumsikan bahwa effect PMDN, PMA, Tenaga Kerja dan Periode sama untuk setiap provinsi dan diasumsikan rata-rata PDRB tiap provinsi adalah berbeda maka dampak setiap peningkatan PMDN sebesar 1 juta rupiah di seluruh provinsi terhadap PDRB di seluruh provinsi adalah sebesar 0,005032 juta rupiah dan dampak setiap peningkatan Tenaga Kerja sebesar 1 jiwa/ orang di seluruh provinsi terhadap PDRB di seluruh provinsi adalah sebesar 0,031660 juta rupiah sedangkan dampak Periode terhadap PDRB adalah sebesar 55105,47 juta rupiah setelah krisis dibandingkan sebelum krisis. Sementara PMA tidak significant terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
4. Pengaruh PMDN dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Pulau Jawa jika dilihat dari penyebaran PMDN maupun Tenaga Kerja di sektor-sektor provinsi di Pulau Jawa dan kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB di Pulau Jawa menunjukkan kesesuaian artinya terjadi hubungan adanya pengaruh PMDN dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Pulau Jawa.

## 6.2. Saran

1. Melihat bahwa ternyata PMDN memiliki peranan dalam PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa dalam kurun waktu yang diamati maka dalam rangka meningkatkan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa terutama peningkatan PMDN, pemerintah pusat maupun daerah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan :

- 1). Memperkuat Kelembagaan (Birokrasi).

Masalah birokrasi ini menyangkut perbaikan dalam perizinan, kejelasan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan investasi yang menjamin kepastian hukum. Dengan adanya prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit dan adanya kejelasan peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum akan membuat para investor mau terus menanamkan investasinya. Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit bisa dilakukan dengan penyederhanaan waktu proses perizinan (semakin cepat semakin baik) dan tidak adanya pungutan liar sedangkan dari kejelasan peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum yaitu dibuat aturan yang memberikan keleluasaan bagi investor dalam memilih usaha dan juga kelonggaran dalam jumlah nilai penanaman investasi serta memberikan insentif pembebasan pajak yang terlalu memberatkan.

- 2). Perbaikan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Lainnya.
- Peran infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya seperti transportasi, listrik, teknologi dan sebagainya juga perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan investasi terutama PMDN di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan akses jalan yang memadai terutama di wilayah-wilayah industri dan juga pembangunan instalasi listrik yang memadai sehingga mendukung dalam kelancaran produksi. Dengan adanya dukungan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya akan berdampak pada peningkatan produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
2. Seperti halnya dengan PMDN, tenaga kerja pun memiliki peranan dalam PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa dalam kurun waktu yang diamati. Untuk meningkatkan peran tenaga kerja terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa dapat diambil langkah-langkah kebijakan :
- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 

Sumber daya manusia yang handal (memiliki keterampilan dan kecakapan dibidangnya) adalah sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan produksi. Untuk meningkatkan sumber daya manusia menjadi handal dapat dilaksanakan dengan pemberian pelatihan-pelatihan (*training*) dibidangnya masing-masing sehingga menjadi tenaga ahli. Pemberian pelatihan-pelatihan (*training*) ini dapat dilakukan atas inisiatif pemerintah daerah masing-masing atau bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan dibidangnya.
  - 2). Kejelasan Peraturan Ketenagakerjaan.
 

Penting sekali adanya kejelasan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dalam upaya meminimalkan terjadinya konflik antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja, karena itu perlu dibuat peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang seimbang dalam mengakomodasi kepentingan kedua pihak berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam ketenagakerjaan seperti mengenai penetapan upah dapat dilakukan dengan negoisasi antara pihak pekerja dan manajemen dan juga mengenai perjanjian kerja/ kontrak kerja dapat dibuat lebih fleksibel sesuai kesepakatan sehingga dapat meningkatkan produktifitas pekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi.

## DAFTAR REFERENSI

- Asian Development Bank, (2005), *Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia*, Economic and Research Departement Development Indicators and Policy Research Division.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik, (2007), *PDRB Kabupaten Nunukan 2007 menurut Lapangan Usaha*, Kabupaten Nunukan.
- Badan Pusat Statistik, (2003), *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2003 : Pedoman Pencacah*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, (2008), *Jakarta Dalam Angka, Jakarta in Figures 2008*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (2008), *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2008*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, (2008), *Jawa Barat dalam Angka, Jawa Barat in Figures 2008*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, (2008), *Jawa Tengah dalam Angka, Jawa Tengah in Figures 2008*, Kerjasama Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, (2008), *Provinsi Jawa Timur dalam Angka, Jawa Timur Province in Figures 2008*.
- Baltagi, Badi H., (2005), *Econometric Analysis of Panel Data*, John Wilwy, USA.
- Boediono, (1991), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Case, Karl E. and Fair, Ray C. (1999), *Principles of Economics Fifth edition*, New Jersey, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River.
- Conover, J.W., (1999), *Practical Nonparametric Statistics*, Texas Tech University, 3<sup>rd</sup> edition, USA.
- Depnakertrans – All Right Reserved. Available : <http://www.nakertrans.go.id>.
- Faizal Noor, Henry, (2005), *Manajemen Investasi dan Keuangan*, STIA LAN Press, Jakarta.
- Irawan, dkk, (1992), *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.

- Jhingan M.L., (2004), *The Economics of Development and Planning*, 16<sup>th</sup> ed, Vicas Publishing House, New Delhi.
- Mankiw, Gregory N., (2003), *Macroeconomics*, 5<sup>th</sup> edition, Worth Publishers, New York.
- Manurung, J. Jonni, dkk, (2005) *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Penerbit Elex Media Computindo, Gramedia, Jakarta.
- Nachrowi, D. Nachrowi dan Usman, Hardius, (2006), *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Lembaga Penerbit-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LP-FEUI), Jakarta.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala, (2004), *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Ramadhani Can, Laily, (2009), *Problema Tenaga Kerja dalam Kebijakan Publik*, Malut Post, Rabu 18 Februari.
- Salvatore, Dominick and Diulio, Eugene A., (2004), *Prinsip-prinsip Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Seetanah, B. and Khadaroo, J.A., (2007), *Foreign Direct Investment and Growth : New Evidences from Sub-Saharan Afrika Countries*. School Publik Policy & Management University of Technologi, Mauritius Pointes-Aux-Sables Recruit and Department of Economic & Statistics University of Mauritius.
- Soekartawi, (1993), *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , (1990), *Teori Ekonomi Produksi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, (1985), *Ekonomi Pembangunan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dengan Bima Grafika, Jakarta.
- Susanti, Hera, dkk, (2000), *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, LPEM-FEUI, Jakarta.
- Verbeek, Marno, (2001), *A. Guide to Modern Econometrics*, John Willey, USA.
- Ward, Michael, (1976), *The Measurement of Capital*, OECD, Paris.
- Widodo, Suseno Triyanto, (1990), *Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Zhang, Kevin H., (2006), *Foreign Direct Investment and Economic Growth in China : A Panel Data Study for 1992-2004*, Department of Economics Illinois State University, USA.

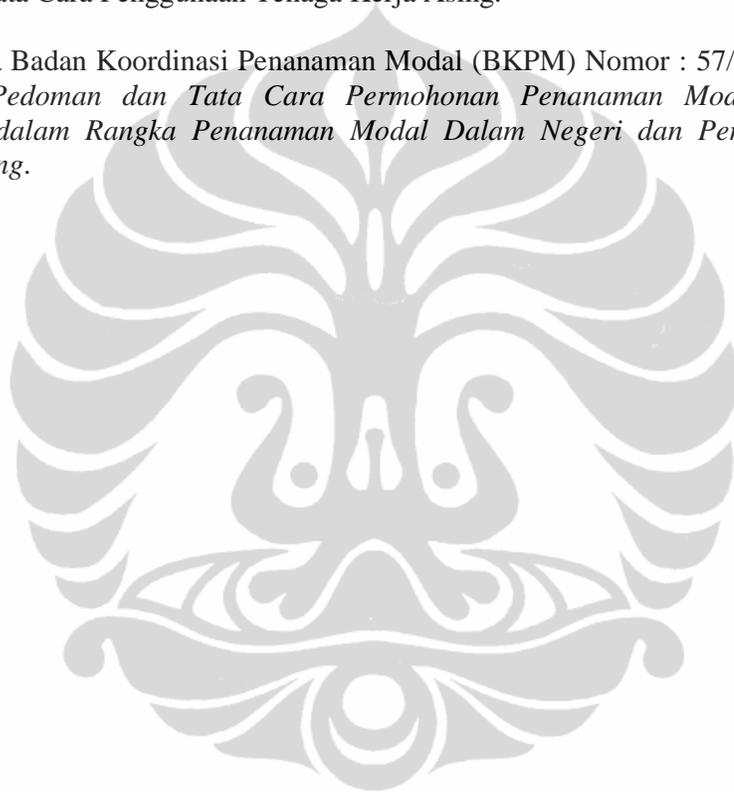
Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008  
Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 57/SK/2004  
Tentang *Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.*



## ANALISIS DESKRIPTIF

## Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation
PMDN	2287109	3009839.355
PMA	4505453	6483031.398
TK	1E+007	6695851.960
PDRB	145301.9	104778.10182
Valid N (listwise)		

Keterangan (satuan) :

PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000

PMDN : Juta/ million (Rp)

PMA : Ribu/ thousand (US \$)

TK : Jiwa/ Orang

	Mean	Std. Deviation
PMDN	3328251	2728383.369
PMA	8472369	7033202.856
TK	3202844	788338.35009
PDRB	226522.3	120132.81725
Valid N (listwise)		

a. Provinsi = DKI

	Mean	Std. Deviation
PMDN	5032806	4168900.094
PMA	9271310	6240128.024
TK	2E+007	1964766.261
PDRB	191267.8	67769.42540
Valid N (listwise)		

a. Provinsi = JABAR

	Mean	Std. Deviation
PMDN	774830.8	681906.86151
PMA	616590.1	918990.79598
TK	1E+007	895173.86788
PDRB	105678.3	38747.11432
Valid N (listwise)		

a. Provinsi = JATENG

	Mean	Std. Deviation
PMDN	2197816	2344263.492
PMA	4105958	7278184.537
TK	2E+007	948802.25268
PDRB	190913.4	71009.20170
Valid N (listwise)		

a. Provinsi = JATIM

	Mean	Std. Deviation
PMDN	101841.1	162915.04463
PMA	61038.32	89429.42438
TK	1576351	106471.82954
PDRB	12127.44	5080.86395
Valid N (listwise)		

a. Provinsi = YOGYA

## ANALISIS REGRESI (CROSS SECTION OLS)

## Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 <sup>a</sup>	.543	.522	72448.06321

a. Predictors : (Constant), PERIODE, PMDN, TK, PMA

Keterangan (satuan) :

PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000

PMDN : Juta/ million (Rp)

PMA : Ribu/ thousand (US \$)

TK : Jiwa/ Orang

Periode : Dummy Krisis (0 : 1990-1996; 1 : 1997-2007)

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.3E+011	4	1.327E+001	25.289	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4.5E+011	85	5248721863		
	Total	9.8E+001	89			

a. Predictors : (Constant), PERIODE, PMDN, TK, PMA

b. Dependent Variabel : PDRB

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26624.873	17082.438		1.559	.123
	PMDN	.013	.003	.381	4.532	.000
	PMA	.005	.001	.333	3.863	.000
	TK	.003	.001	.198	3.630	.010
	PERIODE	52411.119	17049.504	.245	3.074	.003

a. Dependent Variable : PDRB

**PANEL DATA (COMMON DAN FIXED EFFECT)**

- **COMMON**

Dependent Variable : ?PDRB  
 Method : Pooled Least Squares  
 Date : 12/16/09 Time 10:12  
 Sample : 1990 2007  
 Included observations : 18  
 Number of cross-sections used : 5  
 Total panel (balanced) observations : 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26624.87	17082.44	1.558611	0.1228
?PMDN	0.013247	0.002923	4.532286	0.0000
?PMA	0.005385	0.001394	3.862706	0.0002
?TK	0.003095	0.001177	2.629887	0.0101
?PERIODE	52411.12	17049.50	3.074055	0.0028
R-squared	0.543394	Mean dependent var		145301.9
Adjusted R-squared	0.521907	S.D. dependent var		104778.1
S.E. of regression	72448.06	Sum squared resid		4.46E+11
Log likelihood	-1132.289	F-statistic		25.28905
Durbin-Watson stat	0.898568	Prob(F-statistic)		0.000000

Dependent Variable : ?PDRB  
 Method : Pooled Least Squares  
 Date : 12/16/09 Time : 10:14  
 Sample : 1990 2007  
 Included observations : 18  
 Number of cross-sections used : 5  
 Total panel (balanced) observations : 85  
 Convergence achieved after 21 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	312538.0	420246.2	0.743702	0.4593
?PMDN	0.005822	0.001753	3.321005	0.0014
?PMA	1.08E-06	0.000729	0.001480	0.9988
?TK	0.022352	0.007313	3.056741	0.0031
?PERIODE	73697.21	20133.63	3.660404	0.0005
AR(1)	0.970955	0.030688	31.64140	0.0000
R-squared	0.844380	Mean dependent var		151767.7
Adjusted R-squared	0.834530	S.D. dependent var		104044.9
S.E. of regression	42323.34	Sum squared resid		1.42E+11
Log likelihood	-1023.012	F-statistic		85.72921
Durbin-Watson stat	2.308901	Prob(F-statistic)		0.000000

(Lanjutan)

**- FIXED EFFECT**

Dependent Variable : ?PDRB  
Method : Pooled Least Squares  
Sample : 1990 2007  
Included observations : 18  
Number of cross-sections used : 5  
Total panel (balanced) observations : 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
?PMDN	0.011086	0.002321	4.776746	0.0000
?PMA	0.002129	0.001152	1.848953	0.0681
?TK	0.025212	0.006788	3.714042	0.0004
?PERIODE	31484.07	15577.40	2.021138	0.0466
Fixed Effects				
_DKI--C	71595.36			
_JABAR--C	-306033.0			
_JATENG--C	-289366.0			
_JATIM--C	-279625.4			
_YOGYA--C	48114.07			
R-squared	0.776855	Mean dependent var		145301.9
Adjusted R-squared	0.754816	S.D. dependent var		104778.1
S.E. of regression	51881.97	Sum squared resid		2.18E+11
Log likelihood	-1100.069	F-statistic		35.24912
Durbin-Watson stat	1.151977	Prob(F-statistic)		0.000000

Dependent Variable : ?PDRB  
Method : Pooled Least Squares  
Sample : 1990 2007  
Included observations : 18  
Number of cross-sections used : 5  
Total panel (balanced) observations : 85  
Convergence achieved after 8 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
?PMDN	0.005032	0.001795	2.802912	0.0064
?PMA	0.000142	0.000756	0.187976	0.8514
?TK	0.031660	0.007811	4.053008	0.0001
?PERIODE	55105.47	21520.78	2.560571	0.0125
AR(1)	0.729634	0.080948	9.013596	0.0000
Fixed Effects				
_DKI--C	209189.2			
_JABAR--C	-300556.8			
_JATENG--C	-306449.0			
_JATIM--C	-278362.2			
_YOGYA--C	7490.487			
R-squared	0.874666	Mean dependent var		151767.7
Adjusted R-squared	0.859625	S.D. dependent var		104044.9
S.E. of regression	38982.08	Sum squared resid		1.14E+11
Log likelihood	-1013.813	F-statistic		58.15543
Durbin-Watson stat	2.120269	Prob(F-statistic)		0.000000

## UJI CHOW

Hasil pengujian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

UJI	NILAI		F-Hitung
Chow	RRSS	1.42E+11	4.974
	URSS	1.14E+11	
	N	5	
	T	18	
	K	4	

Uji	F Test	F Tabel		Hasil		Kesimpulan
Uji Chow	4.974	$\alpha = 0,01$	3.5600	F Test > F Tabel	HO Ditolak	Fixed Effect
		$\alpha = 0,05$	2.4844			
		$\alpha = 0,10$	2.0156			

### Model Terbaik (Fixed Effect)

Dependent Variable : ?PDRB

Method : Pooled Least Squares

Sample : 1990 2007

Included observations : 18

Number of cross-sections used : 5

Total panel (balanced) observations : 85

Convergence achieved after 8 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
?PMDN	0.005032	0.001795	2.802912	0.0064
?PMA	0.000142	0.000756	0.187976	0.8514
?TK	0.031660	0.007811	4.053008	0.0001
?PERIODE	55105.47	21520.78	2.560571	0.0125
AR(1)	0.729634	0.080948	9.013596	0.0000
Fixed Effects				
_DKI--C	209189.2			
_JABAR--C	-300556.8			
_JATENG--C	-306449.0			
_JATIM--C	-278362.2			
_YOGYA--C	7490.487			
R-squared	0.874666	Mean dependent var		151767.7
Adjusted R-squared	0.859625	S.D. dependent var		104044.9
S.E. of regression	38982.08	Sum squared resid		1.14E+11
Log likelihood	-1013.813	F-statistic		58.15543
Durbin-Watson stat	2.120269	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 1

**DATA PDRB, PMDN, PMA, TENAGA KERJA DAN PERIODE WAKTU (DUMMY KRISIS)  
PROPINSI DKI JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN DI YOGYAKARTA**

Tahun	PDRB_DKI	PDRB_JABAR	PDRB_JATENG	PDRB_JATIM	PDRB_YOGYA	PMDN_DKI	PMDN_JABAR
1990	56,665.10	67,708.21	36,361.78	64,024.49	3,151.60	1174561	100791.287
1991	61,084.08	72,371.09	38,964.57	68,560.37	3,315.25	2603230	1128567.081
1992	66,635.54	77,441.40	41,863.60	73,389.60	3,545.19	1414828	2306498.097
1993	71,948.60	82,775.43	44,415.90	78,463.27	3,771.73	6871191	6116917.211
1994	211,929.19	203,359.80	101,823.87	188,100.12	11,786.33	8339155	11217717.1
1995	231,567.70	219,777.03	109,300.66	203,486.40	12,726.74	4817938	7827928.873
1996	252,629.22	240,007.70	117,280.26	220,295.88	13,718.74	8866240	8305586.211
1997	265,529.49	251,702.87	120,831.64	231,358.77	14,219.00	9266359	16870251.12
1998	219,089.22	206,963.72	106,642.86	194,062.73	12,628.77	3667283	4450584.138
1999	218,458.11	187,952.94	110,366.83	196,417.48	12,961.38	1591181	3606774.202
2000	227,924.12	195,753.03	114,701.31	202,830.06	13,480.60	1540112	5417420.8
2001	238,673.94	203,369.00	118,816.40	210,448.57	14,056.32	1972647	470992.9358
2002	250,331.16	209,731.19	123,038.54	218,452.39	14,687.28	1473854	6867978.289
2003	263,624.24	219,525.22	129,166.46	228,884.46	15,360.41	3489486	1974218.356
2004	278,524.82	230,003.50	135,789.87	242,228.89	16,146.42	2767140	2102694.863
2005	295,270.54	242,883.88	143,051.21	256,374.73	16,910.88	1732714	2124903.993
2006	312,826.71	257,499.45	150,682.65	271,249.32	17,535.75	1925218	2892003.666
2007	332,971.26	273,995.14	159,110.25	287,814.18	18,291.51	2479458	5908679.181

**Keterangan (Satuan) :**

PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000

PMDN : Juta / million (Rp)

PMA : Ribu/ thousand (US \$)

TK : Jiwa/ Orang

0 : Tidak terjadi krisis

1 : Terjadi krisis

(Lanjutan)

PMDN_JATENG	PMDN_JATIM	PMDN_YOGYA	PMA_DKI	PMA_JABAR	PMA_JATENG	PMA_JATIM	PMA_YOGYA
206819.3382	503096.286	3072.9446	746966.5	368379.6882	20475.60462	384721.0513	2168.147561
310535.7572	1198840.97	15529.919	1827968	661532.8578	128971.5661	260259.9099	10870.91171
444113.163	649255.468	4393.2485	1134156	1012236.828	17204.63685	3559765.185	13876.04989
1510199.575	737265.002	34298.073	1347124	12671364.87	19460.02671	338400.4136	10835.82822
1648549.878	3999258.03	133372.89	4619766	7959534.847	635558.8293	1847794.428	5216.262545
511972.0954	8690316.65	358154.83	3028257	8282146.736	213351.9636	2454975.23	2549.08634
857504.672	4823639.29	33083.825	8510006	7413930.442	350561.2256	3153201.153	236981.1204
1693186.672	2134507.42	547608.68	7384072	8656042.534	265035.8647	1485564.546	19417.00385
1177441.339	5758389.5	414193.13	4823492	25035961.74	462781.2436	4839856.565	5903.62445
622877.2596	1584708.64	7394.0453	8253945	15890734.88	3840048.324	4122186.192	92496.15305
2561163.5	3935469.3	108813.6	11148755	17537308.34	1062091.73	32107302.71	57401.16812
641318.4358	1113751.3	41178.617	9364173	6306818.773	437169.0246	1344577.589	1859.949928
537047.5865	119959.074	54602.988	7041286	9304835.403	183825.4801	646091.0271	1233.177517
264595.751	404451.311	18025.952	19046718	7593070.626	363217.1785	1461600.055	223103.3662
69567.19771	303220.152	10388.782	9050959	8258085.769	627198.2959	1211033.881	8769.053668
601919.0274	2578349.78	18696.899	21576632	15511069.41	141415.7031	4330823.759	112344.3792
147345.3107	294247.717	11922.046	8405959	8089199.252	1860396.762	2028715.456	266444.3539
140797.0402	927962.514	18379.731	25192411	6331331.666	469858.008	8330366.86	4277.415795

(Lanjutan)

TK_DKI	TK_JABAR	TK_JATENG	TK_JATIM	TK_YOGYA	DUMMY KRISIS
2938549	12718594	13424784	15432144	1502690	0
2815748	13242168	13544104	15566687	1540230	0
2841159	13892887	13611177	15489201	1556842	0
2947175	13876469	13632439	15589769	1512323	0
3135439	14327990	13765142	16305320	1528609	0
3222288	14163322	13462285	15570627	1415529	0
3480760	15176561	14262731	15414278	1453218	0
3624016	15307495	14128038	16588550	1493940	1
3553850	15623836	14186853	16833798	1450952	1
3785076	16181026	14621149	16982225	1524870	1
3426731	17048013	15301674	16904756	1978329	1
3415454	17583376	15070846	16891628	1630168	1
3267526	17634931	15154856	17011512	1644190	1
3379202	17285328	15124082	16525698	1658103	1
3497359	17908757	15528110	17374955	1701802	1
3565331	17944112	15548609	17668317	1757702	1
3812590	18233386	15567335	17669660	1750575	1
3842944	19237483	16304058	18751421	1774245	1

**Tabel 1.1.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB, PMDN, PMA dan Tenaga Kerja**  
**Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa (Tahun 1990-2007)**

Tahun	Provinsi DKI Jakarta				Provinsi Jawa Barat				Provinsi Jawa Tengah				Provinsi Jawa Timur				Provinsi D.I. Yogyakarta			
	PDRB	PMDN	PMA	TK	PDRB	PMDN	PMA	TK	PDRB	PMDN	PMA	TK	PDRB	PMDN	PMA	TK	PDRB	PMDN	PMA	TK
1991	7.8	121.63	144.72	-4.18	6.89	1019.71	79.60	4.12	7.16	50.19	529.89	0.89	7.08	138.29	-32.35	0.87	5.19	405.50	401.38	2.50
1992	8.63	-45.65	-37.95	0.90	7.01	104.37	53.01	4.91	7.44	43.30	-86.66	0.50	7.04	-45.84	1267.77	-0.50	6.94	-71.71	27.65	1.08
1993	8.43	385.65	18.77	3.73	6.89	165.20	1151.82	-0.12	6.10	240.05	13.11	0.16	6.91	13.55	-90.49	0.65	6.39	680.74	-21.91	-2.86
1994	8.61	21.36	242.93	6.39	7.20	83.39	-37.18	3.25	6.96	9.16	3165.97	0.97	7.23	442.44	446.04	4.59	8.11	288.86	-51.86	1.08
1995	9.27	-42.22	-34.45	2.77	8.07	-30.21	4.05	-1.15	7.34	-68.94	-66.43	-2.20	8.18	117.29	32.85	-4.51	7.98	168.53	-51.13	-7.40
1996	9.1	84.02	181.02	8.02	9.21	6.10	-10.48	7.15	7.30	67.49	64.31	5.95	8.26	-44.49	28.44	-1.00	7.79	-90.76	919.70	2.66
1997	5.11	4.51	-13.23	4.12	4.87	103.12	16.75	0.86	3.03	97.45	-24.39	-0.94	5.02	-55.75	-52.88	7.62	3.65	1555.25	-91.80	2.80
1998	-17.49	-60.42	-34.67	-1.94	-17.77	-73.62	189.23	2.07	-11.74	-30.46	74.61	0.42	-16.12	169.77	225.79	1.48	-11.18	-24.36	-69.59	-2.88
1999	-0.29	-56.61	71-12	6.51	-9.19	-18.95	-36.53	3.57	3.49	-47.10	729.77	3.06	1.21	-72.48	-14.83	0.88	2.63	-98.21	919.80	5.09
2000	4.33	-3.21	35.07	-9.47	4.15	50.20	10.36	5.36	3.93	311.18	-730.95	4.65	3.26	148.34	678.89	-0.46	4.01	1371.64	-37.94	10.06
2001	4.72	28.08	-16.01	-0.33	3.89	-91.30	-64.03	3.14	3.59	-74.96	-58.84	-1.51	3.76	-71.69	-95.81	-0.08	4.27	-62.15	-96.76	-2.87
2002	4.88	-25.28	-24.81	-4.33	3.13	1358.19	47.54	0.29	3.55	-16.25	-57.95	0.56	3.80	-89.23	-51.95	0.71	4.49	32.60	-33.67	0.86
2003	5.31	136.76	170.50	3.42	4.67	-71.25	-18.39	-1.98	4.98	-50.73	97.59	-0.20	4.78	237.16	126.22	-2.86	4.58	-66.98	1799.94	0.85
2004	5.65	-20.70	-52.48	3.50	4.77	6.51	8.76	3.61	5.13	-73.71	72.68	2.67	5.83	-25.02	-17.14	5.14	5.12	-42.37	-96.07	2.64
2005	6.01	-37.38	138.39	1.94	5.60	1.06	87.83	0.20	5.35	765.24	-77.45	0.13	5.84	750.32	257.61	1.69	4.73	79.97	1181.15	3.28
2006	5.95	11.11	-61.04	6.94	6.02	36.10	-47.85	1.61	5.33	-75.52	1215.55	0.12	5.80	-88.58	-53.16	0.01	3.70	-36.23	137.16	-0.41
2007	6.44	28.79	199.69	0.80	6.41	104.31	-21.17	3.51	5.59	-4.44	-74.74	4.73	6.11	214.10	310.62	6.12	4.31	54.16	-98.84	1.35

Sumber : Data diolah dari BPS Provinsi di Pulau Jawa

Keterangan (Satuan) :

PDRB : Juta Rupiah (million rupiahs) tahun dasar 2000

PMDN : Juta/ million (Rp)

PMA : Ribu/ thousand (US \$)

TK : Jiwa/ orang